

Somba Opu

No. 13 Th. Ke-9 Desember 2003 - ISSN 1411-2930
BP3 Sulselra-Tengah

Somba Opu

No. 13 Th. ke-9 Desember 2003 ISSN 1411-2930

BP3 Sulselra-Tengah

Somba Opu

No. 13, Th. Ke-9 Desember 2003

Copyright ©2003, Suaka PSP Sulselra
ISSN 1411-2930

Jurnal Somba Opu diterbitkan oleh BP3 Sulselra-Tengah dimaksudkan sebagai media komunikasi para pakar dan praktisi dari berbagai bidang dengan fokus pada pembahasan ilmiah, deskripsi dan survey, mengenai Benda Cagar Budaya serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya yang meliputi bidang, sejarah, arkeologi, antropologi, arsitektur dan bidang-bidang lain yang berkaitan. Terbit setiap bulan April dan November.

Pelindung

Kepala Suaka PSP Sulselra

Pengarah

Bachri Sjamsu

Pemimpin Redaksi

Muh. Hidayat M.

Wakil Pemimpin Redaksi

Muslimin A.R. Effendy

Anggota Redaksi

Muhammad Natsir, Irvani Rasyid

Tata Letak dan Ilustrasi

Jamaluddin

Perwajahan

Samsiah

Alamat Redaksi

Kompleks Benteng Ujung Pandang

Jl. Ujung Pandang No. 1 Makassar 90111

Phone : (62-411) 331117, 321702 Fax.: (62-411) 321701

E-mail: BP3@Upandang. Wasantara.net.id.

Redaksi menerima naskah dari para ahli atau praktisi yang berminat pada masalah pelestarian Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan jurnal ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; dengan spasi ganda 10-20 halaman kwarto. Karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, asal disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah isi. Karangan yang dimuat tidak harus sejalan dengan pendapat Redaksi. ☒

Serambi Redaksi

Ketika jurnal ini pertama kali terbit sembilan tahun yang lalu, ekspektasi akan kemunculan ide-ide orisinil seputar kajian sejarah, arkeologi, antropologi dan arsitektur serta strategi pelestarian dan pemanfaatan bcb/situs masih menjadi sebuah angan-angan. Hal ini sangat menggelisahkan hati karena minat untuk menuangkan gagasan ke dalam bahasa tulisan sangatlah sulit, dan terbilang sedikit di antara mereka yang ingin berbagi dengan kelompok lain, terutama dengan pembaca.

Tetapi tiga tahun terakhir ini, kami melihat sebuah kecenderungan baru di kalangan para pakar dan praktisi, setidaknya dari perspektif *archaic* untuk menebar aura keilmuan, tidak sekadar mencerdaskan kehidupan intelektual komunitas tertentu namun sejatinya secara *holistic*, bisa menjangkau semua segmen. Sungguh, sebuah fenomena yang sangat menggairahkan.

Mencermati perkembangan demikian, kami pun mencoba berbenah diri, meredesign terbitan; dari ukuran majalah ke dalam format buku. Ini bukan tanpa alasan, bukankah kita sekarang lebih suka memilih hal-hal yang sifatnya praktis, instant, sederhana yang lebih mencerminkan kemodernan dan kecanggihan berpikir dari sebuah produk. Sebagai edisi akhir, dan satu-satunya yang "mampu" diterbitkan tahun 2003 ini Jurnal Somba Opu bisa hadir di tangan pembaca dengan format baru tersebut. Selamat membaca!

Redaksi

Daftar Isi

- 1** Upaya Pelestarian Situs Kota: Studi Kasus Kota Makassar
Moh. Natsir
- 8** Pelestarian Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Pariwisata
Muh. Hidayat M.
- 15** Benteng Somba Opu dan Prospeknya di Era Globalisasi
Albertinus
- 23** Peran LSM Dalam Pengelolaan Museum Situs: Studi Kasus Beberapa Museum Situs di Tana Toraja
Tato M. Nur
- 30** Peranan Perpustakaan Dalam Penyebarluasan Informasi Kepurbakalaan
Amir Djambia
- 34** Ragam Hias Tongkonan: Tinjauan Bentuk dan Fungsi
Irwani Rasyid
- 38** Bangunan Kayu dan Bambu di Sulawesi Selatan: Permasalahan dan Sistem Pemeliharaannya
Munafri
- 45** Peninggalan Megalithik Batu Pake Gojeng Sinjai Sulawesi Selatan
Abd. Rifai Husain
- 49** Menantang Badai, Menembus Batas: Dunia Maritim Nusantara Abad ke 16-19
Muslimin A.R. Effendy
- 63** Jejak Komunitas Bugis-Makassar: Sebuah Tinjauan Sejarah dan Arkeologi
Andi Nuralang
- 75** Penyusunan Rencana Kerja Pemugaran
Ismijono

Upaya Pelestarian Situs Kota: Studi Kasus Kota Makassar

Mohammad Natsir

(Kasubpok Inventarisasi dan Registrasi BP3 Sulselra-Tengah)

Pendahuluan

Gagasan tentang pelestarian bangunan kuno dan bersejarah di Indonesia dari hitungan umur sudah cukup tua. Lembaga purbakala itu, diawali dengan dibentuknya Commisie in Nederlandch Indie dan pada tahun 1931 berhasil menelorkan Monumenten Ordonantie (MO) sebagai acuan dalam upaya pelestarian bangunan peninggalan sejarah dan purbakala. Pada tahun 1992 lahir Undang-Undang No.5 tentang Benda Cagar Budaya (bcb), sebagai pembaharuan atas Monumenten Ordonantie buatan Belanda.

Kini lembaga purbakala, telah berumur 99 tahun. Dalam rentang waktu 99 tahun itu, upaya pelstarian benda cagar budaya (bcb), belum memperlihatkan hasil yang maksimal, apalagi kalau dibandingkan dengan gerakan pelestarian lingkungan hidup yang baru berumur 19 tahun (UU No. 4 tahun 1984 dan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Umur lembaga purbakala dan peraturan pendukungnya yang seharusnya sudah sangat mapan, dirasakan sangat ironi, karena dalam kenyataannya bcb sering dipaksa terlibat dalam konflik kepentingan antar sektor. Akibatnya bcb yang memiliki sifat tidak dapat diulang, hanya sekali terjadi atau sekali saja dibuat pada masa lalu, terpaksa harus rata dengan tanah, musnah.

Kasus penghancuran bcb, punahnya warisan budaya, penurunan kualitas sumber daya budaya, rusaknya situs, merembaknya pencurian dan perdagangan bcb, dan lain-lain sebagai bukti perlunya inovasi dan solusi efektif dalam penanganan pelestarian bcb. Kondisi seperti itu terjadi di mana-mana di pelosok-pelosok desa, apalagi di kota-kota besar.

Dalam artikel ini penulis mencoba membahas tentang upaya pelestarian situs kota, dengan kasus kota Makassar. Penanganan pelestarian bcb di kota, dianggap sangat penting mengingat kompleksnya permasalahan di kota-kota besar yang sedikit banyak mempengaruhi upaya pelestarian bcb. Sederet masalah yang dapat mempengaruhi pelestarian bcb di kota. Pembangunan, penataan kota, kebutuhan lahan (tanah meningkat), harga tanah/bangunan meningkat, keterbatasan lahan permukiman, munculnya para investor dengan bangunan serba modern, meningkatnya kebutuhan akan sarana pelayanan masyarakat, kebutuhan masyarakat kota (pemilik

Karena kompleksnya permasalahan yang menghambat pelestarian situs dan bangunan sejarah dan purbakala di kota, maka perlu dipikirkan jalan keluarnya. Kondisi seperti itulah kiranya yang menjadi alasan Tjandrasasmita (1983), Gunadi (1992), menyatakan bahwa penanganan bcb dari tendensi hukum, harus didukung dengan pendekatan metodologis alternatif.

Dalam tulisan ini, dikembangkan empat aspek yang kiranya dapat dijadikan renungan, yakni aspek implementasi hukum, peran pemerintah dan masyarakat, koordinasi antar instansi.

Implementasi Hukum

Upaya pelestarian warisan budaya memasuki millenium ke-3, tidak lepas dari permasalahan dan kendala-kendala teknis dan operasional. Kendala teknis, menyangkut perangkat hukum pendukung mulai dari UU, PP, Kepmen sampai Juknis, sedangkan kendala operasional, menyangkut koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.

Secara teoritis pembicaraan mengenai dua aspek menyangkut pelestarian seperti dikemukakan di atas, dalam tataran teori sering dianggap suatu persoalan mudah, namun operasionalnya ternyata sering menjadi penghambat yang menyebabkan lemahnya langkah-langkah kebijakan yang diterapkan pada suatu benda budaya. Salah satu contoh kasus Benteng Ujung Pandang.

UU No. 5 tahun 1992 sebagai perangkat hukum dasar dalam pengelolaan pelestarian benda cagar budaya dan peraturan penjabarannya, di samping masih terdapat kelemahan seperti koordinasi antar UU lainnya seperti lingkungan hidup, tata ruang, tata kota dan lain-lain (dalam penjabaran tidak rinci). Selain itu, petunjuk teknis yang ada sekarang, masih mengacu pada Monumenten Ordonantie tahun 1931.

Pertama, kendala internal yang mungkin dapat diatasi dengan persepsi dan penjabaran yang tepat oleh para pelaku pelestarian. Disini dituntut kreatifitas para pelaksana pelestarian untuk mencari pola penanganan pelestarian yang lebih efektif.

Dalam hubungan itu, perlu dikembangkan pola publikasi yang intensif mengenai aspek nilai penting bcb. Seminar, lokakarya, sarasehan dan bentuk publikasi ilmiah lainnya mengenai bcb mungkin sebagai salah satu solusinya. Elemen-elemen masyarakat diikutkan dalam kegiatan seperti itu, lembaga pemerintah, LSM dan pemilik atau yang menguasai bcb. Pola yang selama ini kita lakukan seperti : **Dilarang**, perlu dipikirkan untuk mengganti kata-kata yang menggugah emosional masyarakat. Misalnya :

Bangunan ini bukti perkembangan kota yang kita cintai, dilindungi berdasarkan UU No.5 tahun 1992.

Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah

Dalam pasal 43 (ayat 1,2) PP No. 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan UU No. 5 tahun 1992, ditegaskan, :

1. Menteri bertanggungjawab atas pengawasan pelestarian benda cagar budaya dan dilakukan bersama-sama secara terpadu antara instansi pemerintah atau dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri atau pimpinan instansi terkait baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Secara garis besar instansi terkait yang dimaksudkan dalam UU No. 5 tahun 1992 di atas, adalah instansi yang secara koordinatif sangat berperan di dalam pengawasan, perlindungan, perizinan, dan lain-lain terhadap bcb. Instansi terkait itu seperti pemerintah daerah, kepolisian, kehakiman, perhubungan, dan instansi koordinatif lainnya di daerah.

Koordinasi dengan pihak kepolisian misalnya, menyangkut penanganan kasus, perhubungan menyangkut lalu lintas bcb, Pemda menyangkut kepemilikan, penataan kota, perizinan dan lain-lain, yang terkait langsung dengan keberadaan bcb. Koordinasi yang dimaksudkan disini, adalah koordinasi langsung antar pejabat instansional untuk mencari solusi bersama, penyatuan visi dan persepsi tentang pelestarian bangunan kuno dan bersejarah.

Aspek lain sebagai penentu keberhasilan pelestarian bcb, adalah peran masyarakat baik secara perorangan, kelompok, yayasan atau lembaga kemasyarakatan. Hal itu juga berkaitan dengan kepemilikan, pengawasan, pemeliharaan, perlindungan dan lain-lain. Masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya pelestarian karena masyarakat itu sendiri menjadi sasaran dalam pemanfaatannya.

Fungsi dan peran masyarakat dapat dimaksimalkan apabila kesadaran, kemauan dan pemahaman tentang nilai, manfaat pelestarian bcb dipahami dengan baik. Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian di dalamnya, agar secara emosional menganggap bahwa pelestarian manfaatnya adalah untuk mereka.

Upaya Pelestarian Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota

Melihat kompleksnya permasalahan mengenai penanganan pelestarian situs dan bangunan, sejarah dan purbakala di kota, maka perlu dipikirkan dua hal pokok, yakni aspek internal dan eksternal dalam penanganan tinggalan-tinggalan itu. Aspek internal menyangkut kreativitas dan inovasi para pelaksana pelestarian dalam mengimplementasikan UU No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, sedangkan aspek eksternal menyangkut keikutsertaan masyarakat termasuk kordinasi antar instansi terkait.

Melihat kondisi internal dan eksternal di atas, perlu dipikirkan langkah-langkah penanganan secara bertahap terhadap situs dan bangunan bersejarah di kota. Langkah pertama adalah mempersiapkan secara dini perangkat hukum termasuk revisi atau penyesuaian UU No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan penjabarannya. Dalam aplikasi tingkat lokal dan regional, perangkat hukum yang sangat mendesak adalah pembuatan atau penerbitan Peraturan Daerah (PERDA), khusus mengenai pengelolaan, koordinasi, pemanfaatan dan aspek-aspek penting lainnya mengenai bcb. Dalam kondisi tertentu, apabila rancangan PERDA belum dapat terealisasi, maka penerbitan Surat Keputusan Gubernur atau Walikota, dapat menjadi pegangan atau acuan sementara.

Dalam kaitan rancangan dan pengesahan PERDA atau SK Gubernur atau Walikota tersebut di atas, sangat ditentukan oleh kemauan politik pemerintah, termasuk partisipasi masyarakat, LSM, dan peran aktif DPRD TkI dan DPRD Kota, termasuk Perguruan Tinggi.

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan penyuluhan. Penyuluhan yang selama ini telah dilaksanakan, perlu ditingkatkan, sehingga sasaran yang ingin dicapai terpenuhi. Penyuluhan tatap muka, dialog interaktif, penyebaran brosur, dan koordinasi langsung antar pejabat instansional perlu lebih digalakkan. Pendekatan seperti di atas, sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan hak dan kerelaan masyarakat mempertahankan keaslian bangunan yang dimiliki atau yang dikuasainya. Mungkin dapat dipikirkan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memberikan penghargaan berupa "Sadar Memugar", "Sadar Lestari", "Sadar Budaya" atau istilah lain yang lebih tepat, terhadap pejabat atau anggota masyarakat yang dianggap mempunyai andil besar dalam upaya pelestarian bcb.

Tahapan ketiga yang perlu dipikirkan, adalah mengadakan penilaian tentang tingkat nilai penting dari setiap bcb yang ada. Hal itu diharapkan menjadi acuan dasar kebijakan, utamanya berkaitan dengan munculnya

benturan kepentingan dengan sektor-sektor lainnya. Tingkat nilai penting itu juga sekaligus menentukan perlakuan terhadap bcb tersebut.

Penutup

Agar pelestarian bcb dapat terlaksana dengan baik, perlu keikutsertaan masyarakat, pemerintah dan pola jemput bola para pelaksana pelestarian sangat dibutuhkan.

Pengelolaan pelestarian benda cagar budaya, harus lebih mengutamakan sistem koordinasi terpadu terutama dengan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya. Di sini diperlukan suatu pola penyampaian peran dan fungsi pelestarian bcb kepada masyarakat harus tepat. Aspek sosial kemasyarakatan perlu dipertimbangkan. Pemerintah dan masyarakat di masing-masing wilayah harus merasa ikut bertanggungjawab atas tinggalan material di wilayahnya.

Dalam mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah, sebaiknya lebih difokuskan pada pemahaman tentang aspek nilai penting, utamanya aspek kemasyarakatan (emosional) dan aspek kemanfaatan ekonomis. Hal itu penting untuk mengikuti kondisi jaman yang sangat menuntut pemikiran pembangunan dari segi kontribusi material. Dengan demikian, sasaran akhir pelestarian bcb, seperti kemanfaatan pemupukan ideologi bangsa dan penggalakan nilai edukatif, pada akhirnya juga akan tercapai. Selain itu bentuk-bentuk penyuluhan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, menumbuhkan kemauan politik pemerintah, termasuk penilaian aspek nilai penting bcb dan mempertimbangkan sisi kepentingan masyarakat dan negara bagi penetapan perlakuan terhadap suatu bangunan atau bcb.

Daftar Bacaan

- Asiarto, Lufthi
1985 *Museum dan Komunikasi. Ujung Pandang, Museum Negeri La Galigo*
- Hamid, Abu.
1985 "Peranan Museum Dalam Pelestarian Benda-Benda Kebudayaan". Ujung Pandang: Museum Negeri La Galigo.
- Mattulada
1996 "Pelestarian Cagar Budaya (Sebuah Catatan/Pokok Pikiran dari Sudut Pandang Ekologi Budaya)". Ujung Pandang : Suaka PSP Sulselra dan Museum Negeri La Galigo.
- Mohammad Natsir
1998 "Peranan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya di Makassar". Buletin *Somba Opu* Edisi ke VI tahun ke 4 April-September 1998.
- 2000 Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Studi Kasus Benteng Ujung Pandang. Buletin *Somba Opu*, Vol. 6 No.9 tahun 2000, Suaka PSP Sulselra, Makassar.
- 2000 *Daftar Bangunan Kolonial di Kota Makassar*. Makassar: Suaka PSP Sulselra (belum diterbitkan).

Pelestarian Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Pariwisata

Muh. Hidayat M.

(Kapokja Dokumentasi dan Penetapan BP3 Sulselra-Tengah,
Mhs. Program Doktor Pendidikan Antropologi UNM)

Pendahuluan

Kepentingan sumber daya budaya (SDB) bagi suatu bangsa telah lama menjadi satu bentuk kesadaran dan secara hukum semakin diperkuat. Di Indonesia misalnya, usaha membangun kekuatan telah dimulai sejak pemerintahan kolonial dengan *Monumen Ordonantis* (MO) Stadlad 238, tentang penyelamatan tempat (situs), barang atau bangunan (artefak) yang bernilai sejarah kebudayaan. Selain itu, Ketetapan MPR RI. Nomor II / MPR / 1993 TENTANG GBHN, UU RI Nomor 24 tahun 1992 pasal 7 (1), UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Kepres Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai satu bentuk kepedulian dan jaminan hukum bagi warisan bangsa Indonesia yang semakin berat di masa depan. Akan tetapi, konflik pelestarian masih sering terjadi. Semakin sering kita saksikan orang-orang yang tega membenturkan sumber daya budaya dengan pembangunan sektor ekonomis dan teknologis. Bahkan mungkin ada yang tega menghancurkan sumber daya budaya, demi kepentingan teknologi dan keuntungan ekonomi semata.

Dalam pembangunan dewasa ini, agaknya dianggap pernyataan kebangsaan bila bangunan fisik berhasil didirikan, dirasakan sebagai suatu keberhasilan. Berhadapan dengan bangunan fisik ini, tidak sedikit bangunan peninggalan sejarah yang sudah dilestarikan, digusur dan dibongkar. Alasan utamanya adalah demi keindahan kota dan penataan bangunan, sesuai dengan strategi perencanaan kota. Para perencana kota yang berpikiran sempit itu, tanpa pengetahuan atau memang tidak mau tahu tempat dan bangunan peninggalan sejarah, diratakan untuk dibangun toko swalayan, bank dan fasilitas kota lainnya. Perlindungan terhadap peninggalan sejarah, baik yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan pemerintah untuk dilestarikan maupun bakal menjadi monumen menjadi dilematis.

Manfaat Sumber Daya Arkeologi

Sumber daya arkeologi dewasa ini menjadi sangat penting karena memiliki potensi yang strategis untuk mengembangkan kepariwisataan di Indonesia.

Dengan memanfaatkan sumber daya arkeologi sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah airnya; mewujudkan solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam masyarakat. Selain itu pemanfaatan sumber daya arkeologi diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan PAD. Sedangkan bagi masyarakat sangat memungkinkan untuk menambah penghasilan dari berbagai aspek maupun sebagai pemandu wisata.

Tinggalan arkeologi adalah warisan budaya yang sangat penting nilainya sebagai sumber sejarah bangsa maupun sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa dimasa kini dan masa akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan melestarikannya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan makna menyebabkan kurangnya "rasa memiliki", kurangnya rasa memiliki akan berdampak negatif terhadap keamanan peninggalan arkeologi. Pada prinsipnya ancaman terhadap keamanan dan kelestarian diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam yaitu para "pewaris budaya" yang memanfaatkan tinggalan budaya untuk kepentingan tertentu tanpa berorientasi pada perlindungan dan pelestarian. Faktor eksternal adalah berasal dari para "non pewaris" yang tidak mempunyai ikatan emosional terhadap warisan budaya kita sehingga ada sebagian dari mereka yang mempunyai "rasa mamiliki". Untuk itulah maka diperlukan upaya-upaya menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih memahami serta mempertebal "rasa mamiliki" warisan budaya bangsanya.

Usaha-usaha tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan Perundang-undangan. Namun demikian peraturan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan perubahan sikap mental masyarakat. Berbagai jalur dapat ditempuh untuk menyebarkan informasi baik jalur pendidikan maupun jalur media massa agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Penyebaran informasi tersebut bukan saja tertuju kepada masyarakat umum yang memang belum memahami akan adanya peraturan yang ada, namun juga tertuju kepada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Tidak sedikit lembaga-lembaga tersebut yang belum tahu akan peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber daya arkeologi.

Tinggalan arkeologi yang berupa situs dan semua benda yang terkandung di dalamnya merupakan hasil aktivitas manusia masa lampau yang perlu ditelusuri. Upaya menelusuri masa lampau adalah merupakan hak asasi setiap manusia (Mc Gimsey, 1972;5). Oleh karena itu pemahaman

terhadap makna peninggalan arkeologi sangat penting terutama dalam kaitannya untuk mengetahui sejarah kehidupan nenek moyang kita. Dengan memahami sejarah kehidupan nenek moyang akan dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap eksistensi mereka ditengah bangsa lain. Konsep identitas bangsa akan tampak pada tinggalan arkeologi.

Pemahaman benda-benda tinggalan arkeologi sangat bermanfaat dan merupakan dasar dan pembentuk kepribadian bangsa. Dalam perjalanannya, kebudayaan bangsa Indonesia berkontak dengan kebudayaan lain. Dalam kontak budaya yang telah berlangsung berabad-abad tersebut terbukti bahwa bangsa Indonesia tidak semata-mata menyerap mentah-mentah unsur budaya asing. Hal tersebut disebabkan oleh terbentuknya kepribadian budaya bangsa (local genius). Unsur budaya asing dipakai sebagai unsur yang dapat memperkaya budaya kita. Kebudayaan dari luar akan diseleksi dan diadaptasi dengan kondisi lokal. Kepribadian bangsa secara umum dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa dan menjadi suatu ciri khas yang sulit dipisahkan dengan bangsa itu sendiri. Nilai-nilai tersebut akan membentuk rasa percaya dan kemampuan bangsanya sendiri (Sambung Widodo, 1992).

Arkeologi sebagai salah satu komponen penegak kebudayaan bangsa harus menentukan langkah-langkah yang menguntungkan bagi kehidupan bangsa kita. Sekarang dan dimasa depan beberapa aspek yang urgen untuk disadari dan diterapkan, adalah peningkatan dan perbaikan kualitas SDM serta sarana dan prasarana kerja, dan memiliki program serta visi yang positif sebagai anggota masyarakat global tanpa kehilangan jati diri dan arah dalam arus globalisasi.

Ada tiga manfaat pokok dalam hal pengelolaan warisan budaya (Cleere, 1989 ; 5-10) :

1. Kepentingan ideologis
2. Kepentingan akademis
3. Kepentingan ekonomis

Kepentingan Ideologis

Manfaat ideologi adalah berorientasi untuk menetapkan identitas budaya, warisan budaya. Warisan budaya berperan dalam membangkitkan rasa nasionalisme agar jati diri budaya bangsa dapat direkonstruksi sebagai landasan peraturan dan kesatuan.

Kebudayaan masa prasejarah di Indonesia yang telah dimiliki masyarakat masa itu telah mampu menjangkau dan mengadaptasi unsur-

unsur budaya luar (kebudayaan Hindu-Budha). Peninggalan budaya bendawi masa itu misalnya bangunan-bangunan megalitik memberikan gambaran kepada kita betapa nilai-nilai kegotong royongan telah melekat kepada masyarakat. Nilai budaya gotong royong tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan dicerminkan oleh hasil-hasil budaya masa Hindu Budha. Kebesaran candi Borobudur misalnya merupakan ungkapan pengabdian masyarakat terhadap negara dan agama. Relief-relief yang menghiasai bangunan candi bukan semata-mata berfungsi estesis namun juga mengandung ajaran-ajaran moral.

Dengan demikian perlindungan benda cagar budaya amat diperlukan sebagai salah satu upaya pelestarian warisan budaya bangsa dan merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa

Kepentingan Akademis

Penelitian arkeologi berusaha untuk memproduksi pengetahuan masa lampau. Sumber primer untuk mencapai tujuan tersebut adalah benda-benda arkeologi. Benda-benda tersebut sebagai benda cagar budaya bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kepentingan akademis sebagaimana dimaksudkan bukan hanya tertuju kepada para ahli arkeologi saja akan tetapi juga untuk para ilmunan lainnya maupun para siswa sekolah.

Identitas budaya yang tercermin melalui peninggalan budaya dapat diwariskan kegenerasi melalui aktivitas pendidikan. Dalam hal ini proyek warisan budaya berperan sebagai media yang berfungsi sebagai sarana untuk mengefektifkan proses komunikasi dalam aktivis belajar mengajar.

Kepentingan Ekonomis

Barang kali pemanfaatan sumber daya arkeologi untuk kepentingan ekonomis adalah yang paling memerlukan perhatian kita semua. Peraturan perundangan yang mengatur tentang pemanfaatan BCB sebagai sumber daya arkeologi menyatakan bahwa BCB tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dari segi kepentingan ekonomi pemanfaatan sumber daya arkeologi antara lain untuk kepentingan kepariwisataan merupakan faktor yang dapat menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat.

Negara yang sedang berkembang dewasa ini berupaya mengakumulasi modal dan dana untuk pembangunan melalui pemanfaatan potensi budayanya dengan cara mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya (Collins :1990). Oleh karena itu pengembangan sumber daya budaya sangat diperlukan karena pada akhirnya pariwisata melalui pengembangan sumber daya budaya banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi (Braden dan Wiener, 1980). Kepariwisata Nasional Indonesia dapat dikatakan bertumpu pada potensi yang kuat dari ragam budayanya.

Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sebagai Potensi Kepariwisata

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu andalan Indonesia dalam menggaet devisa negara adalah sektor kepariwisataan. Karena itu pembangunan dan pengembangan kepariwisataan perlu dipacu dengan meningkatkan serta mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industri kerajinan dan usaha-usaha lain guna memelihara, memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan bangsa dengan tetap menjaga citra kepribadian dan martabat bangsa (TAP-MPR. 1988: 144).

Dari uraian diatas dapat diketahui betapa besarnya peranan kebudayaan dalam pengembangan kepariwisataan. Bahkan untuk kepariwisataan di Indonesia pada khususnya wisata budaya masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan wisata lainnya.

Karena itu dalam pengembangan kepariwisataan perlu dibarengi dengan pengembangan dan pembinaan kebudayaan, dengan kata lain perlunya pelestarian budaya dirasakan secara timbal balik, baik di bidang kebudayaan maupun bidang kepariwisataan. Karena pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sebagai obyek atau sarana wisata berarti mendukung pengembangan pariwisata, sedang pengembangan pariwisata sangat penting artinya dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan (SK Dirjen Kebudayaan dan Dirjen Pariwisata, 1983 : 1).

Peranan peninggalan sejarah dan purbakala dalam pengembangan kepariwisataan begitu penting sehingga usaha pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dalam negeri ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa, memperkenalkan kekayaan peninggalan

sejarah serta keindahan alam, termasuk alam bahari di berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air.

Di sini nampak perlunya peninggalan sejarah dan purbakala berperan dalam kehidupan kepariwisataan, dengan kata lain peninggalan sejarah dan purbakala mempunyai andil yang besar dalam menyerap wisatawan.

Situs, benda dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala dapat menjadi juru bicara bangsa terhadap bangsa lain. Dan Ini akan menjadi media yang mengundang kekaguman dan penghormatan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia melalui peninggalan sejarah dan purbakala.

Penutup

Pengelolaan sumber daya arkeologi adalah dalam rangka pemanfaatan yang di dalamnya terkandung pula aspek pelestarian. Pada hakekatnya pelestarian sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya pada umumnya adalah mencakup pelestarian fisik dan pelestarian non fisik. Pelestarian fisik adalah pelestarian terhadap fisik obyek serta konteksnya dengan dimensi ruang, sedangkan pelestarian non fisik adalah pelestarian nilai-nilai yang melekat pada benda tersebut. Pada aspek pelestarian ini pun juga sering terjadi konflik apabila tidak ada kesamaan pandang tentang apa itu pelestarian dan untuk apa wisata budaya perlu dikembangkan.

Melihat betapa pentingnya peninggalan sejarah dan purbakala dalam pembangunan nasional serta mengembangkan kepariwisataan, sehingga dipandang perlu adanya usaha pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala untuk lebih memantapkan pengembangan kepariwisataan.

Pelestarian unsur-unsur budaya dan peninggalan sejarah, perlu kiranya dilakukan usaha-usaha koordinasi lebih mantap lagi guna menyatukan rasa budaya dan pengertian tentang pentingnya makna pelestarian budaya.

Usaha-usaha pemberdayaan tinggla-tinggalan tersebut dapat ditempuh melalui pembinaan kepada masyarakat dengan usaha mengembangkan wadahnya seperti museum, taman purbakala, pariwisata di bidang kebudayaan serta media informasi yang menyangkut konsep-konsep kebudayaan.

Dari usaha-usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam usaha menyelamatkan dan melestarikan benda cagar budaya. Pada akhirnya perkembangan pariwisata budaya harus ditangani secara bijaksana dan terarah, tanpa mengorbankan kepentingan

pelestarian. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya arkeologi secara terpadu, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama untuk kemaslahatan masyarakat. ■

Benteng Somba Opu dan Prospeknya di Era Globalisasi

Albertinus Kaligis

(Kapokja Pengendalian Peninggalan Bawah Air BP3 Sulselra-Tengah)

Pendahuluan

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi globalisasi maka jarak dan tapal batas tidak lagi menjadi hambatan dalam hubungan antar manusia, antar budaya dan antar negara dari belahan bumi lainnya. Sebuah peristiwa temuan di negeri nun jauh di sana hanya dalam beberapa menit dengan hanya mengklik di internet kita sudah dapat mengetahuinya. Begitupun dengan apa yang ada dan yang terjadi di negara kita serta merta dapat diketahui di negara-negara lain. Kekuatannya bisa sangat dahsyat yang dapat mempengaruhi perilaku kehidupan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia klimaksnya adalah sebagian merasa sangat prihatin "*masihkah kebudayaan Indonesia sebagai identitas kita*". Berangkat dari sinilah perlunya penemuan dan penggalian jati diri bangsa. Jati diri tercermin dalam bentuk-bentuk karya "adiluhung" bangsa yang bersifat bendawi maupun non bendawi dan inilah yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan di tengah derasnya isu globalisasi.

Manfaat Warisan Budaya

Di era global ini terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan tuntutan kecenderungan dan implementasi dalam hal pengelolaan warisan budaya oleh beberapa sektor pembangunan di berbagai negara. Oleh karenanya pengelolaan warisan budaya diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan ideologik, ekonomik dan kepentingan akademik.

Kepentingan Ideologi

Bahwa pemanfaatan warisan budaya dapat diorientasikan guna memantapkan identitas budaya yang berkaitan erat dengan fungsi-fungsi pendidikan. Melalui warisan budaya diletakkan harapan agar jatidiri budaya bangsa dapat membangkitkan rasa nasionalisme sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional. Dapat dilihat bagaimana bangkitnya rasa nasionalisme diberbagai bekas negara jajahan telah mendorong peran positif dari warisan budaya, khususnya yang bersifat bendawi (tinggalan arkeologis) di dalam kehidupan bangsa-bangsa tersebut. Tinggalan arkeologis diarahkan untuk dapat mengatasi diskontinuitas budaya yang diakibatkan oleh kolonialisme. Dan pada wujudnya

yang paling ekstrim sebagaimana yang ditunjukkan oleh negara Rodhesia di Afrika telah mengganti nama negaranya dengan menggunakan nama tinggalan arkeologinya yang terbesar sebagai nama negaranya yang baru yaitu Zimbabwe. Di sini terbayang bagaimana sebuah warisan budaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan propaganda politik, sehingga muncullah istilah *political archaeology* ataupun *nationalistic archaeology*. Di beberapa tempat di Jawa tuntutan terhadap peranan dan sumbangan warisan budaya dalam pemantapan jatidiri, terakhir ini mulai memaknai gagasan-gagasan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan kota (*urban development*). Di dua kota, Jogjakarta dan Bandung sudah muncul pemahaman diantara para perencana kota mengenai pentingnya melestarikan benteng lahan budaya dalam penataan bangunan dan ruang kota karena pada titik itulah simbol jatidiri kota divisualisasikan. Tidak mengherankan jika dua kota itu sering dijuluki kota budaya dan kota pelajar. Bagaimana dengan kita Kota Makassar.

Kepentingan Ekonomik

Sejak berakhirnya Perang Dunia II dan semakin intensifnya informasi mengenai berbagai keunikan budaya negara-negara bekas jajahan, banyak orang yang tertarik melakukan perjalanan. Mereka tertarik untuk menyaksikan keanekaragaman dan keunikan budaya sebuah bangsa yang tidak ditemukan di negaranya sendiri. Dan untuk keperluan itu mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Minat melakukan kunjungan dan perjalanan inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya apa yang disebut "pariwisata". Bagi kebanyakan negara-negara baru merdeka peluang ini ditangkap dengan memanfaatkan potensi warisan budayanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya sebagai upaya menghimpun dana untuk membiayai pembangunannya. Pariwisata sangat berkaitan dengan mutu dari perjalanan wisatawan di daerah kunjungan wisata. Semakin tinggi mutu perjalanan tersebut akan semakin kuat mendongkrak nilai jual sebuah objek wisata. Mutu dari pengalaman wisatawan biasanya tidak jauh dari objek unik dan lokal dimana keunikan dan kelangkaan salah satunya ditemukan melalui warisan budaya yang disertai penjelasan-penjelasan dibaliknya.

Pada awalnya pembangunan sektor pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya sebagai objek di satu sisi dipahami negatif dalam konteks kelestarian budaya. Objek akan dipoles dan dipercantik sehingga mencemari warisan budaya itu sendiri. Begitupun dengan datangnya wisatawan di satu objek, beberapa dari unsur warisan budaya itu akan hilang dari tempatnya. Tetapi kalau kita cermati dengan objektif interaksi antara keduanya dapat menghadirkan kecenderungan positif pada warisan budaya itu sendiri.

Memang di era awalnya keberhasilan perencanaan pariwisata budaya diukur pada angka-angka jumlah wisatawan yang datang. Di era ini menghadirkan segmen wisatawan pemburu yang bergerak di lapangan benda-benda arkeologi dan kehidupan masyarakat-tradisional ethnik. Tidak puas hanya dengan sekedar dokumentasi foto atau *postcard* semata, namun cenderung mengejar cinderamata eksklusif, sehingga beberapa bagian dari sebuah warisan budaya tidak lagi berada di tempatnya. Malah banyak diantaranya telah menjadi koleksi museum-museum pribadi di luar negeri. Tetapi belakangan ini muncul pariwisata tipe baru yang didasari oleh semangat "*green tourism*". Gagasan dibalik pariwisata tipe baru ini dianggap bersahabat dimana perhatiannya terhadap kelestarian lingkungan dan sumberdaya (*resources*) merupakan aspek prioritas global. Tipe baru ini menekankan "keaslian" dalam kelestarian warisan budaya. Seiring dengan pemanfaatan warisan budaya sebagai objek kunjungan wisata akan memberi peluang bagi masyarakat lokal sekitar objek meningkatkan penghasilannya. Kembali di sini peran yang diperlihatkan warisan budaya dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sebuah bangsa.

Kepentingan Akademis

Ilmu dapat dikatakan sebagai sebuah industri yang memproduksi pengetahuan (*knowledge*). Bidang ilmu pengetahuan yang kajiannya bertumpu pada warisan budaya khususnya yang berbentuk budaya bendawi sebagai sumber data utamanya adalah ilmu arkeologi. Tetapi beberapa disiplin ilmu lainnya seringkali menggunakan warisan budaya sebagai inspirasi dalam kajian-kajiannya seperti sejarah, antropologi, arsitek seni dan lain-lainnya. Dengan demikian arkeologilah yang paling berkepentingan dalam rangka pemanfaatan akademis warisan budaya. Dalam warisan budaya itulah ide-ide, sistim nilai dan prilaku masyarakat masa lampau tercermin. Dimensi inilah yang kemudian banyak dikaji para arkeolog untuk menyusun tiga tujuan arkeologi yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup dan penggambaran proses budaya. Maka untuk menjawab tiga tujuan tersebut dibutuhkan jenis data yang lebih luas dan bervariasi serta jumlah data yang memadai berkenaan dengan berbagai unsur budaya universal.

Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh manusia masa kini langsung atau tidak cenderung mengakibatkan rusak atau hancur dan hilangnya warisan budaya sebagai sumber data arkeologi yang justru diperlukan untuk menjawab tujuan-tujuan arkeologi. Kecanggihan teori dan metode arkeologi bisa kurang berarti jika diperhadapkan pada ketiadaan atau kekurangan data. Oleh karena itu penyelamatan dan perlindungan warisan budaya perlu

mendapatkan perhatian untuk dikembangkan dan disosialisasikan agar upaya penelitian arkeologi masih berkesempatan mencicipi data yang masih tersisa.

Di samping pemenuhan tugas disiplin keilmuannya hasil-hasil penelitian arkeologi dituntut tidak hanya mampu memproduksi pengetahuan masa lalu tetapi bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan yang objektif bagi kepentingan masyarakat luas.

Benteng Somba Opu : Tantangan dan Prospeknya

Benteng Somba Opu adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang berada di Sulawesi Selatan. Terletak di muara Sungai Jeneberang dan berhadapan langsung dengan laut lepas Selat Makassar. Dengan posisi yang amat strategis ini pusat pemerintahan Kerajaan Gowa yang tadinya berada di Tamalate oleh Raja Gowa IX Daeng Mattanre Karaeng Manguntungi Tumapparisi Kallonna dipindah ke Somba Opu. Dalam catatan sejarah disebutkan ada tujuh raja Gowa yang memerintah di Benteng Somba Opu sebelum akhirnya ditinggalkan pada tahun 1669.

Dalam masa perkembangannya Somba Opu tumbuh menjadi kota pelabuhan dan pusat transaksi dagang berskala Internasional. Bahkan beberapa di antara pedagang-pedagang tersebut telah mendirikan kantor-kantor perwakilan dagangnya seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Denmark dan Belanda. Kantor-kantor perwakilan tersebut dibangun dalam bentuk loji-loji di sebelah utara Benteng Somba Opu.

Kondisi fisik Benteng Somba Opu pada masa itu digambarkan berbentuk empat persegi dengan panjang masing-masing sisinya kurang lebih 2 Km, dimana tinggi temboknya berkisar 7 meter sampai 8 meter dengan ketebalan rata-rata 12 kaki. Di dalam benteng ini raja membangun istananya dan bertempat tinggal di dampingi para pembesar kerajaan lainnya.

Kurang lebih tiga setengah abad lamanya di dalam tanah, maka pada tahun 1989 Benteng Somba Opu mulai mendapatkan perhatian untuk dibina ulang dan dimanfaatkan sebagai objek wisata budaya dengan membangun rumah-rumah tradisional dan adat dari empat etnis penghuni Sulawesi Selatan. Rekonstruksi ataupun pemugaran yang telah dilakukan lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang kini telah berganti nama menjadi Balai Peninggalan Purbakala terhadap Benteng Somba Opu merupakan upaya membina ulang warisan budaya tersebut.

Sejak tahun 1989 sampai sekarang bina ulang Benteng Somba Opu baru pada taraf menampakkan sebagian dinding benteng yang sebelumnya tertimbun tanah. Oleh karena itu masa-masa mendatang harus ada upaya

dan keberanian mengembalikan bentuk utuh dan memperjelas fungsi ruang-ruang dan bagian-bagian Benteng Somba Opu sesuai data yang ditemukan. Hasil bina ulang yang representatif muaranya akan menjadi monumen yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Rumusan identitas budaya yang tercermin di Benteng Somba Opu dapat diwariskan dari ke generasi melalui aktivitas pendidikan. Pada kesempatan kunjungan, siswa tidak hanya diperkenalkan pada melihat sosok Benteng Somba Opu saja, tetapi juga perlu dibangun minat terhadap artefak lainnya yang disajikan di Museum Karaeng Pattingalloang yang juga berada di dalam benteng. Dalam proses itu maka Benteng Somba Opu berperan sebagai media peraga dalam menanamkan pemahaman aspek kesejarahan dan jatidiri bangsa dimana akhirnya diletakkan harapan terciptanya ikatan emosional yang kuat dari anak didik atas bangsa ini. Di sinilah peran ideologik Benteng Somba Opu dapat ditumbuhkan menjawab tantangan era yang mendunia sekarang ini.

Pemanfaatan lainnya dari Benteng Somba Opu adalah penetapannya sebagai objek wisata budaya. Dalam hubungan itu telah dilakukan penataan lahan dan membangun beberapa fasilitas penunjang seperti jalan, bangunan-bangunan ruang pameran milik beberapa instansi, pasar seni dan penataan rumah-rumah penduduk. Termasuk membangun tipe-tipe rumah tradisional atau adat suku-suku di Sulawesi Selatan untuk memberi tekanan pada nuansa keetnikan walau beberapa diantaranya sudah rusak dan roboh karena tidak terpelihara dengan baik. Dan untuk memberi identitas baru Benteng Somba Opu diubah namanya menjadi "*Taman Miniatur Sulawesi*".

Walaupun Benteng Somba Opu telah dikelola menjadi objek pariwisata, tetapi kalau dilihat jumlah kunjungan yang datang ke objek ini masih dapat dihitung dengan jari. Ini adalah tantangan berikutnya dan berkaitan dengan itu; memang harus dilakukan kajian-kajian dalam menemukan akar masalah dan upaya jalan keluarnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa minat pada kunjungan wisata budaya di era baru ini menekankan pada "keaslian". Jika konsep ini diterapkan di Benteng Somba Opu, maka apakah pembangunan rumah-rumah tradisional etnis Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja yang diletakkan di dalam Benteng Somba Opu meningkatkan mutu keaslian ataupun justru mencemarkan.

Untuk membangkitkan minat kunjungan ke Benteng Somba Opu perlu dilakukan beberapa langkah seperti; kondisi keterawatan objek baik bentengnya itu sendiri maupun fasilitas pelengkap dan penunjang lainnya harus terus dipelihara, menggalakkan menambah dan mengembalikan event atraksi budaya yang telah pernah dilakukan yang kini sudah mulai surut dan memberi peluang semua komponen masyarakat beratraksi budaya. Mengapa tidak,

jika masyarakat etnis Cina diberi kesempatan melaksanakan atraksi kesenian barongsai? Penggalakan event atraksi di Benteng Somba Opu secara tidak langsung merupakan ajang promosi bagi keragaman budaya dan etnis di Sulawesi Selatan, di mana wisatawan nantinya diharapkan bisa berkunjung ke daerah asal budaya tersebut. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah promosi, sebab bagaimana mungkin Benteng Somba Opu dapat diketahui oleh masyarakat dunia jika tidak dipromosikan. Dalam hubungan itu pengelola mestinya menangkap era global ini dimana teknologi komunikasi dan informasi sangat maju.

Benteng Somba Opu dapat dipromosikan melalui internet disertai penjelasan-penjelasan sejarah budayanya yang sebenarnya berdiri di belakang semua itu. Jika Benteng Somba Opu dapat menarik minat kunjungan wisatawan sesuai harapan, maka masyarakat lokal sekitar objek akan menerima manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraannya, seperti menawarkan barang-barang kerajinan yang berbau khas tradisional lokal untuk para pengunjung. Itulah gambaran nilai penting ekonomik yang dapat diperankan Benteng Somba Opu sebagai sebuah warisan budaya.

Memaksimalkan peran Benteng Somba Opu atas dua nilai penting yang disebutkan terdahulu yaitu kepentingan ideologik dan kepentingan ekonomik mestinya dilandasi kepentingan akademik. Kegiatan penelitian arkeologi yang dilaksanakan di Benteng Somba Opu masih sangat sedikit dan belum banyak memberi sumbangan dalam membina ulang warisan budaya tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut belum banyak menyingkap berbagai unsur budaya di situs ini yang memang cukup luas, terutama dalam hal fungsi dan hubungan antar ruang. Belum diketahui di mana letak istana raja, di mana gudang logistik untuk persenjataan, di mana pa'banderang, di mana loji-loji yang menjadi kantor dagang dan sudahkah ada penjelasan akademik tidak ditemukannya dinding sisi uatar Benteng Somba Opu?. Atau mungkinkah sisa-sisa artefak dari unsur-unsur budaya yang belum ditemukan tersebut sudah tertutupi oleh timbunan dalam pembuatan sarana jalan dan pembangunan rumah-rumah tradisional serta fasilitas lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga penelitian arkeologis seperti Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala serta Balai Arkeologi, tetapi di sisi lain sekaligus merupakan peluang menuntaskan penelitian-penelitian arkeologi di situs Benteng Somba Opu. Hasil-hasil penelitian arkeologi situs Benteng Somba Opu diharapkan tidak hanya berguna bagi kepentingan ilmu itu sendiri, tetapi juga mampu memberi sumbangan pada upaya pemanfaatan lainnya dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu pengelolaan Benteng Somba Opu seyogyanya dilakukan secara terpadu sehingga sektor-sektor yang berkepentingan dapat bersinergi, dalam

hal ini sektor pelestarian, penelitian dan pariwisata.

Penutup

Betapapun isu globalisasi lebih dikuatirkan membawa berbagai dampak pada perilaku manusia, namun seiring dengan itu kerinduan mengetahui masa lampainya semakin meningkat pula. Dorongan untuk memahami masa lampainya merupakan sisi unik *homosapiens* karena masa lalu adalah komponen masa kini untuk menatap hari esok. Pada kondisi itulah diletakkan harapan berperannya fungsi-fungsi dan kemanfaatan warisan budaya. Benteng Somba Opu sebagai salah satu warisan budaya bangsa dapat diharapkan menjawab tantangan tersebut sekaligus peluang memberi manfaat pada kepentingan pengembangan ilmu arkeologi, pemasukan devisa dan peningkatan penghasilan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.

Peran LSM Dalam Pengelolaan Museum Situs : Studi Kasus Beberapa Museum Situs di Tana Toraja

Tato M. Nur

(Alumnus Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas)

Pengantar

Dapat dikatakan bahwa program bernuansa arkeologi di Indonesia masih sangat kurang dilakukan oleh lembaga swasta (Mahmud, 2001). Dominasi lembaga pemerintah masih terasa sangat kental. Dominansi pemerintah yang berkelanjutan tersebut tanpa disadari akan mengikis rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi. Akibat yang akan terjadi bila tidak dipikirkan sedini mungkin adalah pelunturan jiwa nasionalisme dan sampai di situ, rumitnya varian biokultural yang menjadi perekat kuat nasionalisme (Nur, 2000) akan menjadi bibit disintegrasi bangsa. Tentunya itu bukan hal yang kita inginkan sebagai warga negara Indonesia.

Pelibatan lembaga non pemerintah dalam program *Pemberian Bantuan Subsidi Kegiatan Organisasi Budaya*, oleh Bagian Proyek Pemanfaatan Sejarah dan Purbakala, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata baru-baru ini merupakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Paling tidak, ada tiga kemajuan dari program pelibatan tersebut, pertama menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap peninggalan leluhurnya, kedua memantapkan pemahaman objektif tentang kesejarahan dan ketiga dan yang terpenting adalah terciptanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dapat membuka kemajuan pada pembangunan kebudayaan di masa mendatang.

Tema yang saya ajukan di sini memang bukan hal baru. Beberapa museum situs di daerah tujuan wisata Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan diajukan sebagai studi kasus karena memiliki keunikan dalam keberadaanya. Meskipun sangat terasa ketimpangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik objek wisata tersebut, tetapi paling tidak telah memberikan kontribusi yang berarti terutama dari segi perawatan artefak dan kontribusi finansial ke pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, fenomena tersebut sebenarnya adalah ajakan lembaga kemasyarakatan untuk memulai apa yang menjadi harapan selama ini agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable tourism*). Beberapa kelemahan dan ancaman

penanganan museum situs di Tana Toraja akan diuraikan untuk dipikir dan didukung keberadaannya oleh lembaga terkait nanti.

Museum Situs, Ujung Tombak Informasi BCB

Sebelum mengurai lebih jauh tentang pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan museum situs, terminologi museum perlu dijelaskan sebagai pijakan. Menurut ICOM,

A Museum is a nonprofit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment (Sutaarga,1975).

Konsep museum tersebut dijadikan sebagai konsep dari pendirian Museum Nasional dan Museum Negeri di Indonesia.

Museum situs memiliki konsep pendirian dan pengembangan yang sama dengan Museum Nasional dan museum negeri. Perbedaannya, Museum Nasional dan Museum Negeri memiliki koleksi yang cakupannya luas, dari berbagai wilayah, sementara museum situs adalah suatu bangunan yang didirikan di dekat kompleks bangunan sejarah atau situs peninggalan purbakala. Di dalam museum situs tersimpan koleksi yang berasal dari kompleks bangunan bersejarah atau kepurbakalaan itu saja (Sutaarga, 1975:33).

Gagasan pembangunan museum situs di Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa sumberdaya arkeologi yang memiliki kemanfaatan bagi pembangunan ideologi, sosial dan ekonomi banyak yang hilang. Dengan pengembangan museum-museum situs yang terdistribusi di banyak daerah, kerusakan situs dan tercecernya data-data yang bersifat artefaktual dapat dieliminasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 kemudian, yang memberikan posisi hukum sangat memadai bagi usaha pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi.

Selain tujuan pelestarian, tujuan pemanfaatan sumberdaya arkeologi juga dapat diemban oleh museum situs. Penyebaran informasi budaya yang objektivitasnya tinggi dapat disalurkan apabila koordinasi antar lembaga terkait terjalin dengan baik. Idealnya, lembaga penelitian sebaiknya menyimpan hasil-hasil penelitian pada museum situs. Dalam kerangka

pemikiran ini, museum situs dapat dijadikan ujung tombak untuk mensosialisasikan undang-undang Nomor 5 tahun 1992 serta hasil-hasil penelitian terbaru. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak stagnan. Tujuan sentral untuk pemantapan ideologi, penelitian serta tujuan finansial akhirnya terpadu. Walaupun tujuan pendirian museum situs sangat berbeda bila dioposisikan dengan konsep pariwisata yang menomorsatukan segi finansial, tetapi setidaknya kemanfaatannya pada dua aspek lain (ideologi, ilmu pengetahuan) merupakan alasan objektif.

Museum sebagai salah satu pendukung industri pariwisata budaya, sudah saatnya dipikirkan posisinya dalam pembangunan kebudayaan. Dalam kaitannya dengan distribusi informasi kebudayaan, juga dapat dijadikan ujung tombak untuk *cross* informasi budaya yang sarannya adalah wisatawan domestik. Dengan demikian dapat menopang program pendidikan formal untuk memantapkan pemahaman kesejarahan. Alur tujuan di atas secara langsung menunjuk museum situs sebagai sarana *terjemah budaya*. Peranan ini dapat diambil apabila lembaga penyelamatan, lembaga penelitian dan akademisi dapat bekerja bersama dan menjadikan lembaga swadaya masyarakat sebagai *middle man*. Bila dapat terwujud, bukankah tugas ketiga lembaga tersebut lebih enteng

Museum Situs Di Tana Toraja

Toraja merupakan daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan dengan penonjolan pada pariwisata budaya. Pesona budaya Toraja memang luar biasa. Masyarakat pemuja batu besar tersebut masih memiliki perilaku adat yang sangat tradisional (Duli, 2003). Aluk Todolo, nama kepercayaan mereka masih dijunjung tinggi sampai sekarang.

Objek-objek wisata budaya di Toraja rata-rata adalah situs arkeologi tetapi sampai sekarang masih digunakan untuk pesta-pesta adat. Objek-objek wisata tersebut dikelola oleh organisasi kesatuan adat. Inisiatif mendirikan museum mini muncul karena kesadaran masyarakat adat bahwa peninggalan tersebut harus selalu dipelihara karena ditakutkan nenek moyang (arwah) mereka akan marah dan memberikan *hukuman* kepada masyarakat Toraja. Dibangunlah museum situs atas inisiatif keluarga. Peralatan kehidupan sehari-hari serta peralatan penguburan kemudian dikumpul lalu dibuatkan cerita heroik tentang keluarga yang diwakili.

Beberapa museum situs di Tana Toraja dapat disebutkan misalnya museum *situs Buntu Kalando* Kecamatan Sangalla, *Museum situs Kete Kesu* Kecamatan Sanggalangi dan *Museum situs Pallawa* Kecamatan Sesean. Museum situs tersebut berada di dalam lokasi objek wisata yang

memamerkan rumah adat, beberapa tipe wadah kubur, patung kayu, kerangka manusia, menhir, pahatan tebing, kuburan gantung dan lain-lain. Sedangkan ketiga museum situs secara garis besar menyimpan koleksi berupa pakaian adat, pakaian perang, tenunan dan kain, pakaian kulit kayu, ukiran, lempengan emas, piring kayu, tembikar, patung-patung, perhiasan, senjata dan masih banyak lagi jenis yang tidak sempat didata secara detail. Museum situs tersebut seakan melengkapi beberapa objek wisata utama di Toraja selain keindahan alamnya.

Bila dibandingkan, museum situs yang berada di Tana Toraja memiliki perbedaan dengan museum situs yang dikelola sendiri oleh kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan purbakala. Museum situs di Toraja dibiayai dan dikelola oleh masyarakat adat. Sedangkan museum situs yang dikelola oleh Suaka PSP yang dibiayai oleh pemerintah, tidak mendapat pemeliharaan yang baik. Hanya terlihat seperti tempat penyimpanan benda-benda yang tidak diperuntukkan bagi pengunjung situs. Petugas yang berada di lokasi situs hanyalah petugas keamanan dan pemeliharaan situs, bukan untuk mengelola museum situs. Berbeda dengan museum situs di Toraja, lembaga swadaya masyarakat setempat memiliki tanggung jawab tinggi karena punya hubungan geneologi dengan peninggalan yang dikelolanya. Minimal selalu diadakan pembersihan dan perawatan.

Kondisi ketiga museum situs di Tana Toraja masih jauh dari yang diharapkan. Registrasi, identifikasi dan klasifikasi koleksi masih lemah. Demikian pula dengan penataan ruang pameran serta fasilitas pendukungnya, tidak memenuhi standar sebuah museum. Pemeliharaan dan perawatan terlihat tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Selain itu, tidak ada perpustakaan mini yang menyediakan informasi lengkap tentang situs serta manajemennya yang masih terkesan serampangan. Publikasi dan promosi wisata juga terkesan apa adanya.

Kegiatan pemeliharaan berupa pembersihan, penjagaan, perawatan, pembuatan sarana pendukung, dan pemungutan biaya masuk ke dalam situs dilakukan oleh mereka secara terkoordinasi. Pembagian pungutan biaya masuk ke situs, berdasarkan kesepakatan adalah untuk pihak pengelola 60 % dan untuk pemerintah daerah 40 %. Sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada pengelola.

Konsekuensi dan Garis Besar Penanganannya

Konsekuensi logis dari pelibatan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola museum situs tentunya menimbulkan beberapa kelemahan, baik secara teoritis maupun teknis. Berdasarkan pengamatan di lokasi, beberapa

kelemahan yang terlihat adalah sebagai berikut : 1). Minimnya pengetahuan tentang manfaat sumberdaya arkeologi seperti yang disebutkan oleh Cleere (1989); 2). Tujuan pendirian museum situs yang selain untuk merawat peninggalan nenek moyang mereka, juga terkesan cukup berbau finansial; 3). Kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum atas pelanggaran sumberdaya arkeologi; 4). Minimnya pengetahuan tentang prinsip pengelolaan sumberdaya arkeologi yang di dalamnya tercakup kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan; 5). Kemampuan managerial yang sangat lemah sementara museum adalah sebuah lembaga pelayanan masyarakat; 6). Pengelola tidak dapat membedakan benda cagar budaya dan benda non cagar budaya; 7). Adanya kecenderungan penonjolan geneologi yang ujungnya dapat berakses ke hal-hal politis.

Tujuh point di atas adalah kekurangan dari segi teoritis dalam pengelolaan museum situs di Tana Toraja. Sedangkan minimnya fasilitas yang disebabkan karena kurangnya dana, juga sangat jelas terlihat. Meskipun demikian, apresiasi seharusnya diberikan kepada mereka karena secara langsung sudah berpartisipasi memperkecil kerusakan sumberdaya arkeologi. Dapat dibayangkan apabila sikap apatis yang muncul, bukan tidak mungkin data-data berharga koleksi museum situs sudah hilang dicuri atau rusak.

Melihat peran langsung lembaga swadaya masyarakat tersebut, sudah saatnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyambut baik ajakan tersebut. Sebagai langkah awal, mungkin ada baiknya dimulai dari plotting situs lalu menentukan museum situs yang layak bina dan tidak layak bina. Tentunya sejumlah kriteria akan diajukan untuk membuat seleksi. Langkah awal ini untuk mengantisipasi berdirinya museum situs yang tidak layak dari sudut pandang sejarah dan arkeologi. Selain menyangkut layak dan tidak layak, paralelisasi museum situs harus dihindari. Museum situs yang dibinakan nantinya seharusnya dalam satu bingkai dengan perwajahan yang bervariasi.

Setelah memperhitungkan kriteria dengan spesifikasi museum situs, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola harus mendapat porsi pemikiran yang besar. Kursus dan pelatihan seharusnya dirancang khusus untuk memberikan pemahaman dasar tentang kearkeologian, kesejarahan, konsekuensi pelanggaran sumberdaya arkeologi serta wawasan managerial tentang dunia permuseuman. Materi yang dirancang khusus dianggap penting untuk dipikirkan karena pengelola tersebut bukanlah sarjana arkeologi. Karena itu pula, upaya pembinaan harus terus dilakukan dengan cara pemantauan kegiatan museum secara berkala.

Kesimpulan

Pembangunan kebudayaan adalah sebuah tanggung jawab kolektif dan semua potensi harus dipikirkan pemberdayaannya. Karena itu distribusi peranan sangat diperlukan sekarang. Ajakan masyarakat yang dicontohkan di sini dengan munculnya beberapa museum situs sudah saatnya disambut. Bukankah kebudayaan adalah warisan sosial (Childe, 1933).

Dari uraian ringkas di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal :

1. Pengelola benda cagar budaya hendaknya lebih melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif agar tumbuh rasa memiliki terhadap kebudayaannya.
2. Museum situs seperti Museum Nasional dan Museum Negeri lainnya, perlu dibinakan sebagai *sarana terjemah budaya* dan basis distribusi informasi kebudayaan dan kesejarahan.
3. Pendirian dan pembinaan museum situs dalam satu kabupaten seharusnya dalam satu bingkai dengan perwajahan yang berbeda dan menghindari paralelisasi.
4. Pengelolaan museum situs secara profesional dapat menunjang program pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
5. Model pengelolaan museum situs di Toraja belum tentu cocok diterapkan di daerah lain, tergantung kondisi masyarakat dan spesifikasi museum situs tersebut.

Referensi

- Anonim, 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya.
- Childe, V.G. 1933. "Race, People and Cultures in Prehistoric Europe". Dalam *History* No. 8.
- Cleere, H.F. (Ed). 1989. "Archaeological Heritage Management in The Modern World. London, Unwin Hy-Man.
- Duli, Akin. 2003. *Toraja, Dulu dan Kini*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Mahmud, Irfan. (Ed). 2001. *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Lepas. Makassar.
- Nur, Muhammad. 2001. "Museum Situs, Potret Zaman Yang Belum Terberdayakan", dalam *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Lepas. Makassar.
- Sutaarga, Amir. 1975, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Peranan Perpustakaan Dalam Penyebarluasan Informasi Kepurbakalaan

Amir Djambia

(Pustakawan pada BP3 Sulselra-Tengah)

Pada suatu instansi perpustakaan merupakan sarana yang penting untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi seluruh stafnya sebagai bagian dari sarana penunjang dalam melaksanakan tugas, terutama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para karyawan.

Menurut Sumadji (199:11) bahwa perpustakaan adalah tempat menyimpan koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak, dan lain-lain yang diatur dan diorganisasikan menurut sistem tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainya". Dari pengertian ini maka yang menjadi sumber utama rujukan untuk berbagai kepentingan seperti yang telah disebutkan adalah koleksi. Yang dimaksud koleksi pada suatu perpustakaan adalah koleksi berupa naskah yang ditulis tangan; seperti manuskrip, koleksi karya cetakan seperti buku, majalah, surat kabar, relief dan karya grafis elektronik (kaset, video, piringan hitam dan lain-lain). Dari gambaran tersebut maka koleksi perpustakaan adalah kumpulan data dan informasi yang dikemas dalam bentuk dokumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengadaan koleksi di perpustakaan harus sesuai dengan kebutuhan kantor itu sendiri. Menurut seorang pakar perpustakaan Rohingah (1996:5) bahwa perpustakaan merupakan akumulasi dari sejumlah kepentingan yang terdiri dari; pertama; "koleksi perpustakaan harus dipilih sesuai dengan lingkungan pekerjaan suatu instansi; kedua, harus sesuai dengan rencana anggaran; ketiga, sedapat mungkin sesuai dengan standar kualitas, isi dan ekspresi formal; keempat, koleksi perpustakaan harus merupakan sarana rekreasi yang diminati oleh masyarakat untuk belajar dan membaca; kelima, koleksi perpustakaan merupakan kesinambungan antara tujuan perpustakaan dan permintaan pemakai dan; keenam, mengetahui keadaan pemakai yang dilayani".

Berdasarkan prinsip pemilihan bahan pustaka di atas, maka pengembangan koleksi perpustakaan diharapkan dapat memperhatikan

tuntutan kebutuhan pemakai sehingga bermanfaat bagi pemakai itu sendiri untuk menunjang bidang tugas yang diemban pada suatu instansi atau lembaga.

Fungsi Perpustakaan

Fungsi perpustakaan adalah membantu para pengguna untuk menelusuri informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan keterampilan. Langkah ini dapat dilakukan di perpustakaan sebagai pusat pelayanan informasi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Oleh karena itu setiap pemakai harus aktif memperoleh informasi di perpustakaan. Keberadaan perpustakaan pada instansi pemerintah yang lazim disebut perpustakaan khusus, harus menyediakan buku-buku atau koleksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, di kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang segmen kegiatannya kebanyakan berkecimpung di bidang kepublikasian, kesejarahan dan antropologi maka koleksi yang harus dimiliki di perpustakaan tersebut harus sesuai dengan bidang kegiatan kantor tersebut.

Dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan diperlukan kesadaran dan tanggung jawab pemakai untuk memelihara dan menjaga koleksi agar jangan sampai hilang atau rusak. Fungsi perpustakaan yang dikemukakan oleh Daryanto (1989;3) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi edukatif yakni bersifat memberi ilmu pengetahuan melalui buku pelajaran dan bahan pustaka lainnya, mendidik agar orang suka membaca dan belajar sendiri.
2. fungsi informatif yakni memberikan informasi yang diperlukan melalui bahan pustaka yang ada.
3. Fungsi riset memberikan data penelitian dengan cara mencari informasi dan data di perpustakaan yang ada.
4. Fungsi rekreasi membaca buku yang bersifat ringan juga hiburan

Jadi pada hakekatnya perpustakaan adalah pusat pelayanan dan dokumentasi, tempat penyimpanan karya tulis ilmiah di mana pustakawan siap melayani dan memberikan informasi kepada setiap pemakai.

Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Perpustakaan

Minat baca masyarakat Indonesia semakin menunjukkan gejala yang meningkat. Gejala ini mendorong mereka yang berkecimpung dalam bidang ini untuk semakin intensif melaksanakan pameran di tiap-tiap instansi atau lembaga pemerintah yang terkait. Kegiatan ini perlu dilakukan secara kontinu untuk memberikan dorongan agar masyarakat tumbuh

kesadarannya sehingga minat baca di kalangan masyarakat terus tumbuh dan berkembang. Jadi perpustakaan sebagai pusat informasi yang ditawarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi, inilah yang menjadi rujukan dalam meningkatkan minat baca dalam suatu komunitas masyarakat pembaca. Namun pembinaan penggunaan perpustakaan dilaksanakan perlu adanya dana, tenaga dan kesempatan yang tersedia. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca ini, antara lain;

- Penyebaran brosur yang berisi tentang kegiatan kantor, terutama tentang informasi yang mengandung aspek kesejarahaan dan kepurbakalaan yang disebarakan dikalangan pengunjung.
- Penyebaran buku-buku terbitan kantor tentang kegiatan yang dilakukan
- pameran koleksi perpustakaan dan memberikan bimbingan tentang pemakaian perpustakaan
- Komunikasi petugas dengan pemakai perpustakaan.
- Pemutaran film atau audio visual tentang kegiatan kantor.

Kendala Pemanfaatan Perustakaan BP3 Sulselra-Tengah

Rendahnya pemanfaatan koleksi perpustakaan menurut para pengunjung karena masih kurangnya buku mengenai kepurbakalaan yang relevan dengan kegiatan, misi dan visi kantor; kurangnya sarana komunikasi (*comunication barrier*) antara pustakawan dengan pemakai informasi sehingga pustakawan sering dianggap kurang meningkatkan jasa layanannya. Dalam artian kurang terbuka dan ramah memberikan bimbingan kepada pengguna informasi; dirasakan juga kurang ada petunjuk terhadap pengguna perpustakaan yang dapat dimengerti dan menuntun kearah penelusuran informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Menurut Wijaya (1985) bahwa faktor penyebab rendahnya pemakai perpustakaan antara lain :

1. Kurangnya motivasi dari pengguna.
2. Kurangnya keakraban pihak pemakai dengan sumber daya informasi yang tersedia.
3. Makin rumitnya sistem perpustakaan .
4. Kurangnya petunjuk untuk memperoleh dan memanfaatkan pelayanan yang ada.

Koleksi

Jenis koleksi dari suatu perpustakaan disesuaikan dengan kegiatan instansi tersebut. Misalnya departemen pertanian, dimana koleksi perpustakaannya harus lebih banyak mengenai subjek pertanian bukan justru memiliki koleksi yang tidak relevan dengan kegiatan instansi\lembaga. Pengertian koleksi menurut Soeatminah (1997:17) adalah "bahan bacaan berupa buku yang berisi teori dan ilmu pengetahuan, gagasan, penemuan dan lain-lain. Sedangkan non buku yaitu informasi yang termuat melalui film, kaset, piringan hitam, slide dan alat audio visual lainnya sebagai tempat menyimpan informasi.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa bahan pustaka yang ada di perpustakaan memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Sehingga bahan pustaka tersebut harus ditata sesuai dengan nomor klasifikasi, judul dan pengarang agar mempermudah penelusuran kembali bahan informasi tersebut sehingga dapat menarik minat pengunjung membaca di perpustakaan. Menurut penyajian isinya maka koleksi perpustakaan dikelompokkan menurut:

1. Buku teks yaitu membahas masalah karya pengarang
2. Surat kabar tulisan yang memuat berita di sekitar kita
3. Brosur suatu uraian promosi mengenai hal-hal yang aktual
4. Laporan adalah uraian tentang kegiatan kantor yang dilaporkan seluruh instansi terkait

Ragam Hias Tongkonan: Tinjauan Bentuk dan Fungsi

Irwani Rasyid

(Kasubpok Dokumentasi BP3 Sulselra-Tengah)

Pendahuluan

Di Sulawesi Selatan seni lukis telah dikenal sejak jaman prasejarah yakni pada saat manusia mulai menetap di gua-gua. Pada saat itu lukisan bukan hanya merupakan pengungkapan rasa dan hiasan semata tetapi lebih banyak mengandung makna simbolis tertentu. Simbol sangat diperlukan untuk memberikan makna pada sesuatu objek yang ditampilkan. Seperti benda-benda alam; bulan, bintang, matahari, fajar, pergantian musim dan sungai besar, kemudian bencana alam dan seterusnya.

Salah satu bangunan di Toraja yang senantiasa dipenuhi dengan ragam hias adalah rumah adat Tongkorian. Pemberian hiasan pada tongkonan terkait dengan sistim religi bahwa tongkonan merupakan simbolisasi dari kosmos sehingga seluruh aktivitas manusia mulai lahir hingga kematian dimulai dari tongkonan.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang bentuk dan fungsi ragam hias tongkonan terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti dan fungsi arsitektur tongkonan.

Jenis Tongkonan

Tongkonan berasal dari kata "tongkon" yang berarti "duduk". Jadi tongkonan berarti tempat duduk yang dalam pengertian luas berarti suatu tempat untuk mendengarkan perintah, nasehat, petuah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pada masa lalu tongkonan difungsikan sebagai istana atau singgasana dan pusat kekuasaan, adat atau pusat persatuan sebuah rumpun keluarga Toraja.

Ada 3 (tiga) jenis tongkonan yang sangat penting kedudukannya dalam membentuk entitas budaya Toraja, yaitu ; 1). Tongkonan "layuk" difungsikan sebagai pusat kekuasaan untuk menjaga solidaritas keluarga, 2). Tongkonan "pekamberan" dan "pekaindoran" merupakan tempat melaksanakan aturan dan kekuasaan adat, 3). Tongkonan "batu ari'ri", tidak mempunyai peran adat hanya digunakan sebagai tempat pembinaan untuk memperkokoh persatuan dan solidaritas keluarga.

Selain fungsi dan peran yang tidak sama dari masing-masing tongkonan, dari segi konstruksi tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok. Yang berbeda hanya penggunaan tiang tengah rumah yang disebut "arisi posi" untuk "tongkonan layuk" dan "tongkonan pekaindoran" atau "tongkonan pekamberan" sedang tongkonan "batu Ari'ri" tidak menggunakan tiang tersebut. Simbol kekuasaan direfleksikan melalui kepala kerbau ("kabongo") dan peran social kemasyarakatan melalui kepala ayam berleher panjang yang dipasang di bagian depan.

Prosesi pembangunan tongkonan dari awal hingga selesai dilakukan dengan upacara adat *mangrara banua* (pembisan) yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dan upacara *mangrara ditallu rarai*, yakni berupa persembahan 3 (tiga) macam darah binatang ; kerbau, babi dan ayam. Upacara ini dilaksanakan hanya untuk tongkonan layuk dan tongkonan pekamberan.

Untuk menentukan status sosial pemilik tongkonan dapat dilihat pada ukiran dan ragam hias yang dipahatkan. Tongkonan yang dipenuhi ukiran biasanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Yang tidak berukir atau sebahagian saja yang dijumpai umumnya dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Berikut ini penulis akan mencoba membuat klasifikasi dan deskripsi ragam hias yang selalu hadir menghiasi sebuah tongkonan.

Bentuk Ragam Hias Tongkonan

Ragam hias merupakan salah satu elemen yang selalu ada pada sebuah tongkonan. Hiasan-hiasan pada tongkonan dibentuk melalui pahatan yang menghiasi bagian depan, dinding bagian barat dan bagian timur bahkan bahagian belakang. Berdasarkan wujudnya ukiran tersebut terdiri atas 150 jenis yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) motif utama, yaitu fauna, florastik dan geometris.

Motif Fauna

1. *Pa'manuk Londong*, yaitu lukisan ayam yang ditempatkan pada bagian depan tongkonan, berada di atas dari semua ukiran. Ayam sering dijadikan khewan korban pada upacara-upacara adat.
2. *Pa'tedong*, bentuknya seperti kepala kerbau melambangkan etos kerja dan simbol kemakmuran.
3. *Korang* (bangau putih). Sering digambarkan selalu berkawan dengan yang lain untuk bersama-sama mencari nafkah.
4. *Kotte* (itik) simbol tanggung jawab. Ukiran ini biasa menghiasi tongkonan yang tidak mempunyai fungsi adat (tongkonan batu ar'ri).

Motif Flora

1. *Pa'daun bolu* (daun sirih), biasanya selalu digunakan pada setiap upacara adat, terutama sebagai persembahan kepada dewa-dewa.
2. *Pa'daun paria* (daun paria) melambangkan nasehat dan ajaran, meskipun pahit namun selalu dicari. Sering digunakan sebagai obat cacar.
3. *Pa'lalo tabang*, ukiran yang menyerupai pucuk daun sebagai symbol agar setiap manusia tetap sehat dan berjasa bagi manusia lain.
4. *Pa'lalo paku* sebagai lambing harapan agar manusia senantiasa berhati lurus dalam segala hal.
5. *Pa'bunga*, sebagai symbol bahwa manusia dapat dikenang karena ahlak dan pengetahuannya.

Motif Geometris

Ragam hias geometris telah dikenal sejak jaman prasejarah terdiri atas bentuk-bentuk garis; garis lurus, garis lengkung, spirial/pilin, belah ketupat, dan silang lingkaran. Bahkan motif bulu dan binatang dimasukan dalam ragam hias geometris. Ragam hias yang terdapat pada tongkonan, antara lain ;

1. Motif garis lurus vertikal yang dikenal dengan motif "passusuk" ditempatkan pada dinding-dinding rumah tongkonan melambangkan sistim kemasyarakatan yang demokratis dan menjunjung tinggi persatuan sesuai ajaran Aluk Todolo.
2. Motif lingkaran menyerupai cakar (matahari) dikenal dengan "pa'barre allo" ditempatkan dibagian depan/utara tongkonan dan terletak paling atas dari semua ukiran, melambangkan sumber kehidupan dan keyakinan.
3. Motif bulan dan bintang (*bulan solo bintoen*). Unsur alam ini digambarkan sebagai sumber manusia memperoleh pertanggalan, baik untuk bersawah, berkebun maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dianggap sebagai tanda kebesaran para bangsawan.
4. Motif sampol (*pa'barra-barra*), semua manusia sama dihadapan Tuhan.
5. Motif Swastika (*Pakadang pao*) sebagai simbol kemudahan rezeki yang diperoleh dengan halal, tidak iri dan dengki terhadap orang lain.
6. Motif kotak-kotak (*pa'sala'bi*) melambangkan bahwa masa perkembangan dan pengenalan masyarakat yang sudah demikian

Motif Flora

1. *Pa'daun bolu* (daun sirih), biasanya selalu digunakan pada setiap upacara adat, terutama sebagai persembahan kepada dewa-dewa.
2. *Pa'daun paria* (daun paria) melambangkan nasehat dan ajaran, meskipun pahit namun selalu dicari. Sering digunakan sebagai obat cacar.
3. *Pa'lalo tabang*, ukiran yang menyerupai pucuk daun sebagai symbol agar setiap manusia tetap sehat dan berjasa bagi manusia lain.
4. *Pa'lalo paku* sebagai lambing harapan agar manusia senantiasa berhati lurus dalam segala hal.
5. *Pa'bunga*, sebagai symbol bahwa manusia dapat dikenang karena ahlak dan pengetahuannya.

Motif Geometris

Ragam hias geometris telah dikenal sejak jaman prasejarah terdiri atas bentuk-bentuk garis; garis lurus, garis lengkung, spirial/pilin, belah ketupat, dan silang lingkaran. Bahkan motif bulu dan binatang dimasukan dalam ragam hias geometris. Ragam hias yang terdapat pada tongkonan, antara lain ;

1. Motif garis lurus vertikal yang dikenal dengan motif "passusuk" ditempatkan pada dinding-dinding rumah tongkonan melambangkan sistim kemasyarakatan yang demokratis dan menjunjung tinggi persatuan sesuai ajaran Aluk Todolo.
2. Motif lingkaran menyerupai cakar (matahari) dikenal dengan "pa'barre allo" ditempatkan dibagian depan/utara tongkonan dan terletak paling atas dari semua ukiran, melambangkan sumber kehidupan dan keyakinan.
3. Motif bulan dan bintang (*bulan solo bintoen*). Unsur alam ini digambarkan sebagai sumber manusia memperoleh pertanggalan, baik untuk bersawah, berkebun maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dianggap sebagai tanda kebesaran para bangsawan.
4. Motif sampol (*pa'barra-barra*), semua manusia sama dihadapan Tuhan.
5. Motif Swastika (*Pakadang pao*) sebagai simbol kemudahan rezeki yang diperoleh dengan halal, tidak iri dan dengki terhadap orang lain.
6. Motif kotak-kotak (*pa'sala'bi*) melambangkan bahwa masa perkembangan dan pengenalan masyarakat yang sudah demikian

bebas dan luas agar dapat membatasi diri dan tidak terlibat dalam pertentangan, selalu waspada.

7. Motif swastika-*passekang solo*, perlambang orang yang suka mencampuri urusan orang lain yang dapat membahayakan sesama manusia.
8. Motif garis melingkar ke dalam -*pa'tangke lamu'*, lambang perkembangbiakan manusia untuk menempati seluruh penjuru bumi.
9. *Pa'bungkang tasik*, lambang kebaikan dan kejujuran.
10. Motif *kawung-pa'bambo wei*, simbol kemampuan seorang pemimpin mengatasi masalah terutama menyangkut kepentingan rakyat banyak.
11. *Pa' bua kopi*, lambang kerja keras untuk mencapai kemakmuran.
12. *Pa' gayang* menggambarkan bahwa manusia mempunyai nilai dan harga diri, prestasi yang tak dapat dilanggar begitu saja oleh siapapun.

Dari sekian banyak lukisan tersebut nampaknya ada 4 (empat) motif yang selalu muncul dan yang pertama dipasang, khususnya pada tongkonan lujuk/ tongkonan pekamberan. Keempat ukiran tersebut adalah : pa'barre allo, pa' manuk londong, pa' tedong, dan pa' susuk. Keempat ukiran ini merupakan simbolisasi dari empat aturan pokok yang harus ditaati masyarakat Toraja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ; 1). Mengenal dan patuh terhadap Tuhan, 2). Mengenal hukum, 3). Mengenal etas kerja, 4). Mempererat hubungan antar manusia.

Penutup

Dari diskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ornamen pada bangunan tongkonan merupakan perwujudan dan simbolisasi dari seluruh norma, aturan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya ornamen pada sebuah tongkonan maka di dalam penampakkannya haruslah mengikuti persyaratan yang tercantum pada petunjuk umum yang berlaku. Namun, apakah ornamen Toraja diilhami oleh lukisan pada dinding-dinding gua tentunya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Bangunan Kayu dan Bambu di Sulawesi Selatan: Permasalahan dan Sistem Pemeliharaannya

Munafri

(Konservator pada BP3 Sulselra-Tengah)

Pendahuluan

Bangunan kayu dan bambu di Sulawesi Selatan telah lama dikenal masyarakat. Berbagai jenis bangunan kayu dan bambu tersebar diberbagai daerah yang mamiliki arsitektur khas lokal sebagai suatu hasil karya kebudayaan dari berbagi etnis yang ada di Sulawesi Selatan.

Pada umumnya benda cagar budaya dari kayu dan bambu yang masih tersisa adalah berupa rumah adat, makam dan lumbung. Komponen-komponen dari bangunan-bangunan tersebut kebanyakan terdiri dari perpaduan antara bahan-bahan kayu dan bambu, tetapi tidak sedikit pula bangunan hanya terdiri dari bahan kayu saja atau sebaliknya.

Keberadaan banguna kayu dan bambu tersebut sangat rentan terhadap berbagai bentuk kerusakan dan pelapukan. Faktor pemicu terjadinya pelapukan adalah dari bahan kayu dan bambu itu sendiri, di mana diketahui bahwa kayu dan bambu berasal dari bahan organik yang sangat mudah terurai.

Kayu dan bambu sebagai salah satu bahan dasar pembuatan bangunan benda cagar budaya dapat mengalami kemunduran kualitas seperti rusak, keropos ataupun lapuk. Kerusakan umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor abiotis dan biotis.

Kerusakan kayu dan bambu karena pengaruh faktor abiotis disebabkan oleh unsur pengaruh alam, di mana suhu, kelembaban udara, hujan, panas dan sinar matahari silih berganti secara drastis mengakibatkan terjadinya degradasi atau penurunan sifat-sifat dasar struktur kayu dan bambu.

Sedangkan kerusakan kayu dan bambu karena faktor biotis disebabkan oleh serangan makhluk hidup perusak kayu dan bambu beraneka macam jenisnya. Kebanyakan serangan perusak ini sangat cepat menurunkan nilai keawetan dan umur pakai kayu. Ada jenis yang langsung memakan komponen kayu, ada yang melapukkan kayu, mengubah struktur susunan kimia kayu, tetapi ada pula yang merusak kayu dengan hanya mengubah warna permukaan kayu. Adapun jenis-jenis makhluk hidup perusak kayu dan bambu antara lain adalah cendawan dan kumbang bubuk.

2. Bambu

Bambu adalah tumbuhan berakar serabut yang batangnya beruas-ruas, keras dan tinggi menyerupai pohon kayu. Pada umumnya rumah bambu biasanya dibuat dinding, atap, lantai dan tiang rumah.

Bangunan bambu adalah bangunan yang terbuat dari bambu yang biasanya berfungsi sebagai rumah tinggal, lumbung dan lain-lain. Bambu mudah sekali dibedakan dengan tumbuhan lainnya karena tumbuhnya merumpun, batangnya bulat, berlubang dan beruas-ruas. Bambu termasuk anak suku *bambusoidae* dalam suku *poaceae* atau suku rumput-rumputan.

Bambu merupakan tumbuhan bernilai ekonomi tinggi dan pemakaiannya sangat luas baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk hasil-hasil lain yang diperdagangkan. Diperkirakan bambu di dunia ada 1200-1300 jenis, dan berdasarkan data di lapangan bahwa bambu di Indonesia diketahui terdiri atas 143 jenis.

Penggunaan bambu sebagai bahan bangunan perlu diperhatikan keawetannya, keawetan bambu sangat tergantung pada waktu tebang dan cara penebangannya. Bambu biasanya dipanen setelah berumur 3 tahun keatas dan waktu panennya dipilih antara bulan April-Juni (musim kemarau) di mana pada waktu tersebut zat pati yang terkandung dalam bambu berkurang yang menjadi bahan kumbang bubuk penggerek bambu.

Sistem Pemeliharaan BCB dari Kayu dan Bambu

Pada dasarnya bentuk penanganan pemeliharaan yang dilakukan harus didasarkan atas diagnostik terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan agar dampak yang timbul dapat dihindari sedini mungkin. Berdasarkan atas permasalahan yang umumnya dihadapi pada bangunan benda cagar budaya yang terbuat dari kayu dan bambu, pada dasarnya bentuk penanganan yang dilakukan meliputi pembersihan secara tradisional dan pembersihan secara kimiawi.

1. Pembersihan secara tradisional

Pembersihan benda cagar budaya dengan cara sederhana dilakukan secara rutin setiap hari oleh para juru pelihara. Jenis kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan areal situs dan pembersihan obyek secara langsung dengan menggunakan sapu lidi, sikat halus, kuas dan lain-lain.

Pembersihan secara tradisional menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan langsung diambil dari alam, seperti halnya segiatan pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Obyek

kayu seperti rumah adat dibersihkan secara rutin dengan menggunakan air rendaman tembakau dan pelepah pisang serta air rendaman cengkeh.

Sementara itu menurut informasi, masyarakat Mamasa di Kabupaten Mamasa biasanya membersihkan benda cagar budaya dari kayu dengan ekstrak daun jati dan ekstrak daun sereh. Di lain pihak masyarakat Toraja di Kabupaten Tana Toraja mempunyai tradisi merendam bahan bangunan kayu dan bambu dalam air payau atau lumpur sebelum dibuat rumah. Kebiasaan masyarakat Toraja ini masih berlangsung sampai sekarang.

Pembersihan yang dilakukan masyarakat Mamasa, Toraja dan Jawa Tengah adalah dalam rangka pengawetan benda cagar budaya yang dimiliki masyarakat sekitarnya. Dengan tujuan supaya obyek-obyek tersebut terjaga kelestariannya.

2. Pembersihan secara kimiawi

Yang dimaksud dengan pembersihan secara kimiawi adalah pembersihan benda cagar budaya yang terbuat dari kayu dan bambu dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sudah teruji keefektifannya di dalam laboratorium. Adapun tahapan-tahapan pembersihan secara kimiawi benda cagar budaya dari kayu adalah sebagai berikut:

a. Sterilisasi

Yang dimaksud sterilisasi adalah pembasmian segala jenis serangga terutam rayap tanah, kumbang bubuk dan jamur yang menyerang bangunan kayu. Adapun bahan-bahan kimia yang digunakan adalah alkohol, minyak tanah dan len trik. Pada umumnya larutan len trik yang dipergunakan adalah larutan len trik dengan komposisi 3 %.

Metode pembuatan larutan len trik 3 % adalah dengan melarutkan len trik yang ada ke dalam minyak tanah sebagai bahan pelarut dengan perbandingan 3 ml len trik dan 100 ml Kerosin atau minyak tanah.

Kegiatan sterilisasi dimulai dengan pembersihan permukaan kayu secara kering dengan menggunakan kuas, lalu permukaan kayu yang sudah bersih diolesi larutan alkohol 70 m %, kemudian setelah kering baru disemprot dengan larutan len trik 3 %. Aplikasi bahan ini di ulangi 2-3 kali hingga seluruh permukaan kayu terolesi.

b. Konsolidasi

Konsolidasi adalah penguatan struktur kayu dan bambu, konsolidasi terutama dilakukan pada obyek kayu yang sudah sangat lapuk, baik yang disebabkan oleh kondisi iklim di mana obyek tersebut berada, maupun karena pengaruh air kapiler dan imbasan air hujan.

Adapun bahan konsolidasi yang biasa dipergunakan adalah larutan paraloid B 72 2 %. Cara membuat larutan paraloid B 72 2 % yaitu dengan menimbang 2 gr paraloid B 72 lalu dilarutkan dalam 100 ml clorothene kemudian diaduk hingga semua butiran paraloid larut.

Aplikasi bahan ke obyek adalah dengan cara menggunakan sprayer, diinjeksi dengan spoid atau diolesi dengan kuas.

c. Bonding

Bonding adalah kegiatan penyambungan kayu-kayu yang lepas atau patah. Bahan yang biasa dipergunakan adalah epoxy resin ep-Is.

Adapun cara aplikasi bahannya ke obyek adalah pertamanya bersihkan dahulu permukaan kayu yang akan dilem, kemudian olesi kedua permukaan yang akan disambung dengan lem, kemudian kayu tersebut diklem, setelah kering klem besinya dilepas.

d. Kamufase

Kamufase biasanya dilakukan pada kayu yang berlubang bekas sarang serangga, goresan tajam karena vandalisme dan sebagainya.

Aplikasinya adalah dengan cara mengisi lubang-lubang bekas serangga tersebut dengan campuran resin yang sudah dibuat atau dengan campuran serbuk kayu dan lem fox lalu diperhais sesuai permukaan kayu.

Penutup

Kayu dan bambu merupakan salah satu bahan organik yang dipergunakan untuk membuat bangunan benda cagar budaya. Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya tersebut maka diadakanlah kegiatan pemeliharaan dalam bentuk kegiatan konservasi. Konservasi adalah tindakan yang

b. Konsolidasi

Konsolidasi adalah penguatan struktur kayu dan bambu, konsolidasi terutama dilakukan pada obyek kayu yang sudah sangat lapuk, baik yang disebabkan oleh kondisi iklim di mana obyek tersebut berada, maupun karena pengaruh air kapiler dan imbasan air hujan.

Adapun bahan konsolidasi yang biasa dipergunakan adalah larutan paraloid B 72 2 %. Cara membuat larutan paraloid B 72 2 % yaitu dengan menimbang 2 gr paraloid B 72 lalu dilarutkan dalam 100 ml clorothene kemudian diaduk hingga semua butiran paraloid larut.

Aplikasi bahan ke obyek adalah dengan cara menggunakan sprayer, diinjeksi dengan spoid atau diolesi dengan kuas.

c. Bonding

Bonding adalah kegiatan penyambungan kayu-kayu yang lepas atau patah. Bahan yang biasa dipergunakan adalah epoxy resin ep-Is.

Adapun cara aplikasi bahannya ke obyek adalah pertamanya bersihkan dahulu permukaan kayu yang akan dilem, kemudian olesi kedua permukaan yang akan disambung dengan lem, kemudian kayu tersebut diklem, setelah kering klem besinya dilepas.

d. Kamufase

Kamufase biasanya dilakukan pada kayu yang berlubang bekas sarang serangga, goresan tajam karena vandalisme dan sebagainya.

Aplikasinya adalah dengan cara mengisi lubang-lubang bekas serangga tersebut dengan campuran resin yang sudah dibuat atau dengan campuran serbuk kayu dan lem fox lalu diperhais sesuai permukaan kayu.

Penutup

Kayu dan bambu merupakan salah satu bahan organik yang dipergunakan untuk membuat bangunan benda cagar budaya. Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya tersebut maka diadakanlah kegiatan pemeliharaan dalam bentuk kegiatan konservasi. Konservasi adalah tindakan yang

bersifat teknis arkeologis, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku secara teknis arkeologis.

Dalam pelaksanaannya diperlukan pengetahuan yang bersifat komprehensif sehingga dapat ditangani secara tepat. harus diawali dengan penelitian lapangan dan analisis laboratorium sebelum mengambil tindakan nyata di lapangan ■

Daftar Pustaka

- Fangel D and Wegener G
1995 *Kayu : Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-reaksi.* UGM Press. Yogyakarta.
- Widjaya A. Elizabeth
2001 *Identifikasi Jenis-jenis Bambu di Jawa.* Puslitbang Biologi LIPI, Bogor.
- V. A Nurbalian dan Rahayu
1995 *Budidaya dan Prospek Bisnis Bambu.* PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sadirin Hr.
1995 "Teknis konservasi koleksi BCB Museum", Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Jakarta.

Peninggalan Megalithik Batu Pake Gojeng Sinjai

Abd. Rifai Husain
(Kaur P3 BP3 Sulselra-Tengah)

Bentuk Umum Bangunan Tradisi Megalithik

Megalithik adalah suatu tradisi yang lahir kurang lebih 1500 tahun yang lalu, berkaitan dengan gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari benua Asia Pasifik. Megalithik berasal dari kata latin "mega" (besar) dan "lithos" (batu). Bangunan megalithik tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Bentuk bangunan bermacam-macam; ada yang berdiri tegak yang merupakan sebuah kelompok. Maksud dari pendirian bangunan tersebut di antaranya berlatar belakang pemujaan terhadap nenek moyang, harapan kesejahteraan bagi yang masih hidup, lambang prestise dan lain-lain.

Bentuk-bentuk tempat penguburan dapat berupa batu pake, dolmen, peti kubur batu, bilik batu, sarkofagus, kalamba, atau bejana batu, waruga, batu kandang, dan temu gelang. Di tempat kuburan-kuburan tersebut biasanya terdapat (atau kadang-kadang tidak) beberapa bentuk batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan arwah nenek moyang, seperti menhir patung-patung, batu saji, tembok batu atau jalan batu. Bentuk-bentuk bangunan megalithik disusun dengan batu-batu besar seperti dolmen, undakan batu, piramida, pelinggih.

Perkembangan penelitian lebih lanjut yang bertitik tolak dari gagasan kosmologis yang mengungkapkan ciri-ciri yang lebih asli seperti tembok batu, jalan batu dan batu-batu untuk keperluan irigasi. Di Indonesia tampak variasi-variasi lokal dalam tingkat-tingkat perkembangannya kemudian yang berakulturasi dengan budaya-budaya India, Islam dan Eropa.

Bentuk kubur batu yang ada di Batu Pake Gojeng Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan peninggalan tradisi megalithik yang mendapat pengaruh lokal yang telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan wilayah Bulu-bulu pada umumnya dan daerah Gojeng pada khususnya. Kehidupan megalithik yang berkembang dari jaman logam selalu dihubungkan dengan pemujaan nenek moyang yang telah menciptakan berbagai ragam hias sebagai simbol-simbol atau alat komunikasi dengan arwah nenek moyang yang selalu hinggap membayangi kehidupan mereka.

Megalithik Batu Pake

Salah satu masalah di dalam kepurbakalaan yang sering kali dipandang sebagai titik rawan, adalah usaha mencoba mengerti berbagai fungsi benda purbakala yang ditemukan pada permukaan maupun hasil penggalian kepurbakalaan. Ciri-ciri teknologis, konteks, serta asosiasi berbagai penemuan, sering kali beium dapat menjelaskan fungsinya dimasa lalu. Ini pun berlaku terhadap sisa-sisa bangunan megalithik. Monumen-monumen tersebut selalu dikaitkan dengan situs ataupun kultus kepada leluhur. Seperti yang diungkapkan oleh H.R.Van 'Heeken: "tradisi pendirian bangunan-bangunan megalithik selalu berdasarkan kepercayaan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama bagi kepercayaan tentang adanya pengaruh kuat dari yang mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Orang yang telah mati dipusatkan pada bangunan-bangunan besar yang didirikan, kemudian menjadi medium penghormatan, tahta kedatangan dan menjadi lambang si mati (H.R.Van Heeken. 1958 :44).

Salah satu ciri khas masyarakat megalithik adalah pelaksanaan upacara-upacara yang menyolok pada waktu penguburan, terutama bagi mereka yaang dianggap tokoh masyarakat. Bagi masyarakat ini dalam suatu kematian tidak membawa perubahan essensial dalam sistem kondisi ataupun sifatnya sekaligus jazad dan jiwanya ikut pulang ke tanah yang dianggap asalnya.

Biasanya orang yang berpangkat dan mereka dianggap berjasa kepada masyarakatlah yang sesudah hidup ini akan mencapai tempat yang khusus di akhirat. Kemudian yang ditinggalkan membangun monumen-monumen bagi si mati. Kebaikan-kebaikan tidak hanya memberikan prestise dalam kehidupan, tetapi juga nasib yang lebih baik lagi dalam kehidupan sesudah mati nanti. Bangunan-bangunan tersebut menjadi pelindung "mistik" bagi sikap hidup yang baik dan akan menambah kekayaan serta mempertinggi kesejahteraan hidupnya.

Kebudayaan megalithik berkembang sejak masa neolithik yang hingga kini masih bertahan dan dapat dijumpai dibeberapa kuburan Islam dan Kristen. Heine Goldern membedakan adanya dua gelombang besar kebudayaan megalithik yang masuk ke wilayah Indonesia yaitu megalithik tua dan muda. Megalithik tua berkembang kurang lebih 2500-1500 sebeium Masehi dan megalithik muda yang bertanggung dalam ribuan tahun masehi. Selain tiu beliau juga membedakan pula hasil budayanya. Kedua gelombang tersebut, yaitu; Megalithik tua mencirikan bentuk-bentukan batu seperti; menhir, dolmen, undakan, pelinggi dan lain-lain. Sedangkan

ciri-ciri utama megalithik muda yaitu seperti; peti kubur batu, sarkofagus, bejana batu, dan lain-lain.

Situs batu pake Gojeng berdasarkan ciri-ciri teknologinya merupakan situs pemakaman yang bercorak tradisi megalithik. Hal ini dapat diamati pada sistem pembuatan Batu Pake Gojeng yang terdiri dari batuan dasar jenis sedimen lunak yang kemudian dipahat sehingga membentuk persegi empat. Jenazah atau mayat dimasukkan kedalam lubang persegi empat (wadah batu), pada bagian atas ditutup dengan papan batu. Seperti yang dikatakan oleh Bahru Kalllupa bahwa ada dua versi tentang tata cara pemakaman batu pake, yaitu mayat dimasukkan dalam lubang Batu Pake (wadah batu) lalu ditimbun. kemudian yang lain menyatakan bahwa sistem pemakaman pada Batu Pake ini mayat dimasukkan kedalam lubang batu pake kemudian ditutup. Sayangnya sekali penutup tersebut tidak ditemukan lagi hingga sekarang. Beberapa tepi Batu Pake sudah lapuk karena proses alam dan ulah peziarah yang mengambil serpihan batu pake ini sebagai obat dan zimat".

Batu Pake pada umumnya memperlihatkan arah hadap timur barat dengan ukuran yang bervariasi. Pada waktu diadakan *rescue excavation* tahun 1982 oleh Sub Direktorat Perlindungan dan Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Sulselra di dalam lubang Batu Pake tersebut ditemukan gigi manusia. Memperhatikan arah hadap bangunan maka Batu Pake ini, telah memberikan indikasi sebagai makam dari periode pra Islam. Selain gigi manusia ditemukan pula beberapa artefak lain berupa: kapak persegi, asahan dari batu berhias dan manik-manik. Temuan pendukung lainnya seperti sumur batu dan lumpang batu dalam jumlah yang cukup banyak. Temuan lumpang batu ditemukan pada undakan ketiga (puncak bukit) dengan ukuran yang bervariasi antara 10 – 50 cm setiap lubang.

Istilah sumur batu pada situs Batu Pake ini, digunakan berdasarkan fungsinya yaitu lubang-lubang tersebut berukuran cukup besar untuk menampung air hujan yang bertahan berbulan-bulan lamanya. Didukung pula dengan kondisi kawasan situs yang sulit memperoleh air bersih atau air minum dikala musim kemarau. Sumur batu tersebut hingga dewasa ini masih dimanfaatkan untuk sarana penampungan air bersih bagi penduduk disekitarnya terutama pada musim kemarau.

Temuan batu altar pada tepi utara undakan kedua merupakan batu dasar yang dipahat rata seperti lantai. Karena bentuk pada salah satu sisinya yang tinggi dari yang lainnya mengingatkan kita pada altar batu sesajian pada upacara-upacara penghormatan arwah leluhur nenek moyang kita.

ciri-ciri utama megalithik muda yaitu seperti; peti kubur batu, sarkofagus, bejana batu, dan lain-lain.

Situs batu pake Gojeng berdasarkan ciri-ciri teknologinya merupakan situs pemakaman yang bercorak tradisi megalithik. Hal ini dapat diamati pada sistem pembuatan Batu Pake Gojeng yang terdiri dari batuan dasar jenis sedimen lunak yang kemudian dipahat sehingga membentuk persegi empat. Jenazah atau mayat dimasukkan kedalam lubang persegi empat (wadah batu), pada bagian atas ditutup dengan papan batu. Seperti yang dikatakan oleh Bahru Kalllupa bahwa ada dua versi tentang tata cara pemakaman batu pake, yaitu mayat dimasukkan dalam lubang Batu Pake (wadah batu) lalu ditimbun. kemudian yang lain menyatakan bahwa sistem pemakaman pada Batu Pake ini mayat dimasukkan kedalam lubang batu pake kemudian ditutup. Sayangnya penutup tersebut tidak ditemukan lagi hingga sekarang. Beberapa tepi Batu Pake sudah lapuk karena proses alam dan ulah peziarah yang mengambil serpihan batu pake ini sebagai obat dan zimat".

Batu Pake pada umumnya memperlihatkan arah hadap timur barat dengan ukuran yang bervariasi. Pada waktu diadakan *rescue excavation* tahun 1982 oleh Sub Direktorat Perlindungan dan Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Sulselra di dalam lubang Batu Pake tersebut ditemukan gigi manusia. Memperhatikan arah hadap bangunan maka Batu Pake ini, telah memberikan indikasi sebagai makam dari periode pra Islam. Selain gigi manusia ditemukan pula beberapa artefak lain berupa: kapak persegi, asahan dari batu berhias dan manik-manik. Temuan pendukung lainnya seperti sumur batu dan lumpang batu dalam jumlah yang cukup banyak. Temuan lumpang batu ditemukan pada undakan ketiga (puncak bukit) dengan ukuran yang bervariasi antara 10 – 50 cm setiap lubang.

Istilah sumur batu pada situs Batu Pake ini, digunakan berdasarkan fungsinya yaitu lubang-lubang tersebut berukuran cukup besar untuk menampung air hujan yang bertahan berbulan-bulan lamanya. Didukung pula dengan kondisi kawasan situs yang sulit memperoleh air bersih atau air minum dikala musim kemarau. Sumur batu tersebut hingga dewasa ini masih dimanfaatkan untuk sarana penampungan air bersih bagi penduduk disekitarnya terutama pada musim kemarau.

Temuan batu altar pada tepi utara undakan kedua merupakan batu dasar yang dipahat rata seperti lantai. Karena bentuk pada salah satu sisinya yang tinggi dari yang lainnya mengingatkan kita pada altar batu sesajian pada upacara-upacara penghormatan arwah leluhur nenek moyang kita.

Ditinjau dari teknik pembuatan Batu Pake menampakkan perbedaan-perbedaan dengan bentuk makam megalithik yang banyak ditemukan di Indonesia. Perbedaan tersebut terletak pada bahan yaitu bahan batuan andesit dan teknik pembuatannya yang membentuk lubang segi empat panjang. Teknik ini digunakan oleh masyarakat pada waktu itu untuk tujuan memperkuat berdirinya dinding batu, sehingga tidak mudah roboh dan lepas. Perbedaan bentuk tersebut sama sekali tidak terlepas dari latar belakang magis religius manusia pada waktu itu.

Temuan gigi, kapak neolitik, manik-manik, batu asah, kereweng merupakan bekal kubur bagi si mati. Makna penyertaan bekal kubur tersebut yaitu agar si mati dapat melanjutkan kehidupannya di dunia arwah; bekal kubur tersebut dapat pula memberikan gambaran bahwa masyarakat Gojeng sudah mengenal sistim pertanian sejak zaman neolithik. Didukung pula dengan tradisi masyarakat setempat yang hingga dewasa ini adalah petani dan peladang yang masih menggunakan sistim tradisional. Beberapa upacara ritual pasca panen masih dilakukan dan ini merupakan suatu kewajiban yaitu membawa sesajian persembahan kepada leluhur mereka. Upacara ini dilakukan sebelum padi atau jagung dinaikkan di dalam lumbung atau dimakan. Indikasi lain yang dapat mendukung situs Batu Pake sebagai salah satu peninggalan budaya megalithik, yaitu penempatan makam yang diletakkan pada puncak bukit. Penempatan ini mengandung makna yang dipengaruhi oleh alam pikiran masyarakat Gojeng pada waktu itu, yakni bahwa makam pada ketinggian mempunyai makna religius; bahwa roh si mati selalu bersemayam di atas puncak bukit dan menjaga kerabat yang ditinggalkan.

Peninggalan megalithik Gojeng belum dapat diketahui pertanggalannya, namun temuan keramik asing telah memberikan petunjuk, kalau masyarakat Gojeng telah berhubungan dengan dunia luar sejak periode Dinasti Ming ■

Menantang Badai, Menembus Batas : Dunia Maritim Nusantara Abad ke 16-19

Muslimin A.P. Effendy

(Kasubpok Publikasi dan Informasi BP3 Sulselra-Tengah)

Mahan di dalam kajiannya tentang sejarah Kepulauan Indonesia mengajukan enam unsur yang menurutnya, sangat menentukan bagi perkembangan suatu negara menjadi kekuatan laut. Keenam unsur tersebut adalah; 1). kedudukan geografi; 2). bentuk tanah dan pantainya; 3). luas wilayah; 4). jumlah penduduk, 5). karakter penduduk; dan 6). sifat pemerintahnya termasuk lembaga-lembaga nasional. Di antara keenam unsur itu lokasi geografislah yang dianggap penting oleh Mahan (1974: 5). Hampir tanpa kecuali, katanya, sejarah membuktikan bahwa kecenderungan suatu bangsa untuk memperhatikan usaha perdagangannya merupakan unsur utama yang mendorongnya berlayar di laut (Mahan, 1974: 6). Pentingnya faktor geografis ini telah dikaji pula secara panjang lebar oleh Fernand Braudel (1971) di dalam karangannya mengenai sejarah Laut Tengah dan dunia sekitarnya pada Zaman Philips II. Di dalam bagian pertama dari kajiannya itu, Braudel membahas unsur geografis yang bergerak dalam irama "jangka panjang", dan merupakan wadah bagi sejarah dunia Laut Tengah pada abad ke-16. Yang diamatinya adalah gunung gemunung, sungai-sungai dan pulau-pulau, serta jaringan perdagangan, yang sangat tergantung pada keadaan geografis. Unsur geografis ini dapat menyebabkan jalur pelayaran tidak mudah berubah-ubah. Kalaupun terjadi perubahan pada aspek ini, maka perubahan itu akan memakan waktu yang cukup panjang, sampai ribuan tahun. Salah satu contohnya adalah perubahan jalur-jalur pelayaran yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan karang yang menutupi jalur pelayaran tertentu sehingga perlu dicari jalur lain. Selain itu, garis pantai, terutama muara sungai juga tidak mudah berubah sehingga pemukiman di pantai juga bisa berusia panjang (Leirissa, dkk., 1996: 22). Menurut Braudel (1971), lapisan geografis dapat mempengaruhi lapisan ekonomi (keadaan cuaca berakibat terhadap harga hasil bumi), tetapi tidak sebaliknya (depresi ekonomi tidak mengakibatkan musim panas).

Laut sebagai kekuatan pemersatu dalam tradisi bahari telah mendorong sejumlah pakar untuk melakukan kajian terhadap pelayaran Nusantara abad silam. Umpamanya, A.A. Cense telah melakukan usaha

yang amat berharga dalam tinjauannya mengenai pelayaran perahu Makassar-Bugis ke Pantai Utara Australia" (*BKI*, jilid 108, 1952; 48-265). Dan dampak dari pelayaran itu telah memberi dorongan kepada H.J. Heeren untuk melihat pengaruh kebudayaan Indonesia terhadap penduduk di pantai Utara Australia (*Indonesie*, 1952 : 149-153). Tulisan itu sebenarnya bukan merupakan berita tertua tentang pelayaran orang Bugis-Makassar ke luar *Celebes* sejauh yang dapat kita ketahui berdasarkan kesaksian yang ada. Adalah Alexander Dalrymple, seorang berkebangsaan Inggris, yang pada tahun 1768 menyusun sebuah rencana ekspansi perdagangan Inggris ke wilayah kerajaan di Hindia Timur. Ia menyatakan bahwa orang Bugis-Makassar telah berlayar ke lautan yang sangat luas; mereka telah sampai di New Holland bagian Selatan, Papua di Timur [dan Semenanjung Malaya di bagian Barat] (Cence, 1970 : 10).

Motif apakah yang mendorong orang Bugis-Makassar berani mengarungi samudera lepas, yang sewaktu-waktu maut dapat menjemput mereka? Bukankah spirit keberanian yang terpatri dalam semboyan "lebih baik tenggelam daripada pantang surut kembali" (*erokangna tallangan toalia*) itu menghadirkan kekaguman bagi banyak orang, namun sekaligus ketakutan bagi komunitas lain yang merasa khawatir akan nasib negeri mereka dianeksasi oleh suku bangsa pelaut ini?. Nampaknya pelayaran antar kontinental seperti yang dideskripsikan Cence tersebut, dilakukan pelaut-pelaut Makassar-Bugis dengan mengandalkan ketrampilan berlayar yang dipelajarinya secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat bahari. Bahkan diperoleh secara alamiah oleh suasana kelautan itu sendiri. Laut dan perahu bagi mereka dipandang sebagai lambang kehidupan yang sesungguhnya.

Bagi pelaut tradisional, samudera bukan sekedar bentangan air yang sangat luas, sebab setiap perubahan warna, pola gerak air, bentuk gelombang, jenis burung dan ikan di sekelilingnya, bentuk awan dan pantulan sinar matahari, dan sebagainya, adalah petunjuk-petunjuk yang khas baginya untuk menentukan arah perjalanannya (Lapiän, 1997: 26-27). Orang-orang Bugis-Makassar mempunyai *kotika tiliq*, yakni naskah-naskah dalam bahasa daerah untuk meramalkan apakah kapal atau perahu yang dijumpainya bermaksud baik atau jahat. Juga ada *kotika johoro* untuk melihat apakah gelora laut bisa berhasil atau tidak menghempaskan kapal mereka. Di tengah-tengah laut yang luas sekalipun ia tak akan kehilangan akal karena daya rasanya yang kuat dapat membantunya dalam mengambil keputusan.

yang amat berharga dalam tinjauannya mengenai pelayaran perahu Makassar-Bugis ke Pantai Utara Australia" (*BKI*, jilid 108, 1952; 48-265). Dan dampak dari pelayaran itu telah memberi dorongan kepada H.J. Heeren untuk melihat pengaruh kebudayaan Indonesia terhadap penduduk di pantai Utara Australia (*Indonesie*, 1952 : 149-153). Tulisan itu sebenarnya bukan merupakan berita tertua tentang pelayaran orang Bugis-Makassar ke luar *Celebes* sejauh yang dapat kita ketahui berdasarkan kesaksian yang ada. Adalah Alexander Dalrymple, seorang berkebangsaan Inggris, yang pada tahun 1768 menyusun sebuah rencana ekspansi perdagangan Inggris ke wilayah kerajaan di Hindia Timur. Ia menyatakan bahwa orang Bugis-Makassar telah berlayar ke lautan yang sangat luas; mereka telah sampai di New Holland bagian Selatan, Papua di Timur [dan Semenanjung Malaya di bagian Barat] (Cence, 1970 : 10).

Motif apakah yang mendorong orang Bugis-Makassar berani mengarungi samudera lepas, yang sewaktu-waktu maut dapat menjemput mereka? Bukankah spirit keberanian yang terpatri dalam semboyan "lebih baik tenggelam daripada pantang surut kembali" (*erokangna tallangan toalia*) itu menghadirkan kekaguman bagi banyak orang, namun sekaligus ketakutan bagi komunitas lain yang merasa khawatir akan nasib negeri mereka dianeksasi oleh suku bangsa pelaut ini?. Nampaknya pelayaran antar kontinental seperti yang dideskripsikan Cence tersebut, dilakukan pelaut-pelaut Makassar-Bugis dengan mengandalkan ketrampilan berlayar yang dipelajarinya secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat bahari. Bahkan diperoleh secara alamiah oleh suasana kelautan itu sendiri. Laut dan perahu bagi mereka dipandang sebagai lambang kehidupan yang sesungguhnya.

Bagi pelaut tradisional, samudera bukan sekedar bentangan air yang sangat luas, sebab setiap perubahan warna, pola gerak air, bentuk gelombang, jenis burung dan ikan di sekelilingnya, bentuk awan dan pantulan sinar matahari, dan sebagainya, adalah petunjuk-petunjuk yang khas baginya untuk menentukan arah perjalanannya (Lapiän, 1997: 26-27). Orang-orang Bugis-Makassar mempunyai *kotika tiliq*, yakni naskah-naskah dalam bahasa daerah untuk meramalkan apakah kapal atau perahu yang dijumpainya bermaksud baik atau jahat. Juga ada *kotika johoro* untuk melihat apakah gelora laut bisa berhasil atau tidak menghempaskan kapal mereka. Di tengah-tengah laut yang luas sekalipun ia tak akan kehilangan akal karena daya rasanya yang kuat dapat membantunya dalam mengambil keputusan.

Diskusi mengenai pentingnya laut sebagai unsur pemersatu dalam wacana komunikasi budaya antar bangsa, membawa kita menyelami ke dalam, menelusuri alur kebermunculan para "arung samudera" dengan kondisi iklim yang mengitari wilayah mereka, yang mengakibatkan munculnya negeri mereka, dalam jaringan pelayaran niaga. Perhatian kita akan diawali dengan mencoba mengamati keadaan geografis, terutama perubahan angin musim dalam lalu lintas pelayaran ketika itu. Pengamatan atas faktor iklim ini didasarkan atas estimasi bahwa untuk menentukan iklim suatu daerah data curah hujan, angin dan suhu sangat penting untuk diperhatikan. Pengamatan minimal harus dilakukan selama waktu 50 tahun terakhir, dan data dalam interval waktu tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengamatan iklim masa lampau. Namun kelemahannya, mungkin saja terjadi perubahan-perubahan besar dalam jangka waktu yang lama dari periode yang diamati.

Sebagai masyarakat tani dan maritim yang usahanya sangat erat hubungannya dengan iklim, masyarakat Makassar pun telah sejak lama mengamati unsur-unsur iklim. Hanya sifat pengamatan mereka adalah "korelatif". Artinya, gejala iklim senantiasa mereka kaitkan dengan gejala lain. Misalnya, permulaan hujan dikaitkan dengan terbitnya bintang *waluku* (gugusan bintang-bintang yang menyerupai bajak). Bunyi tonggeret dihubungkan dengan hari cerah. Penggunaan cara-cara alamiah berdasarkan kebiasaan dalam siklus kehidupan mereka, yang justru menjadi landasan berpijak bagi pelayar-pelayar tradisional untuk mengawali kegiatannya, telah berkembang menjadi semacam "dogma" yang dipercaya demikian adanya. Barulah pada awal abad ke-20 perhatian terhadap iklim -- dari sudut pandang ilmiah -- mulai tumbuh berkat jasa seorang ahli klimatologi Belanda, Braak yang menulis mengenai iklim Indonesia, khususnya Batavia tahun 1921-1929 (Sandy, 1987).

Menurut Braak bahwa ciri-ciri umum iklim Indonesia adalah; 1). Beriklim panas karena terletak dekat katulistiwa; 2). dipengaruhi angin musim, karena letaknya di antara dua benua, yang musimnya senantiasa berlawanan. Musim yang senantiasa berlawanan itulah selalu mengakibatkan hembusan angin yang arahnya bermusim; 3). beriklim lembab karena luasnya permukaan perairan di antara pulau-pulau; 4). terletak di luar iklim hembusan angin topan karena letaknya di antara 10° LU dan 10° LS (Sandy, 1987: 5).

Iklim untuk wilayah Makassar, pertama-tama dicirikan oleh munculnya resim hujan barat busur 120° BT, hujan maksimum terjadi pada bulan Januari dan hujan minimum berlangsung pada bulan Juli-Agustus. Data

curah hujan yang berhasil direkam sejak lima dasawarsa terakhir ini menggambarkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (719 mm) dan terendah pada bulan Agustus (10 mm). Curah hujan untuk sepuluh bulan lainnya ialah; Februari (531 mm), Maret (425 mm), April (166 mm), Mei (92 mm), Juni (68 mm), Juli (34 mm), September (13 mm), Oktober (40 mm), November (174 mm), dan Desember 590 mm. Rata-rata curah hujan setahun berkisar 2862 mm (Sandy, 1987: 109-110, 18). Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober-April, dan musim kering berlangsung pada bulan Mei-September setiap tahunnya dengan kemantapan arah angin di Laut Sulawesi pada bulan Januari 40%, dan pada bulan Agustus 34% dengan suhu rata-rata berkisar antara 26 hingga 34° C.

Sulawesi sendiri merupakan daerah peralihan antara rezim hujan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Garis peralihan itu terletak pada kira-kira 120° BT atau di lintang Bantaeng Sulawesi Selatan. Makassar, Takalar dan tempat-tempat lainnya di sebelah barat lintang 120° BT itu, memperoleh hujan maksimum pada bulan Januari. Sedangkan tempat-tempat yang terletak di sebelah timur lintang tersebut, seperti Kendari, Kolaka (di Sulawesi Tenggara), Sinjai dan Watampone (di Sulawesi Selatan) memperoleh hujan terbanyak pada bulan Mei atau Juni (Sandy, 1996: 270).

Sulawesi Selatan terdiri dari daratan yang sempit dan bergunung-gunung sehingga pengaruh laut terhadap cuaca sangat besar. Akibatnya di beberapa tempat perubahan cuaca sangat cepat. Cuaca terang pada suatu saat bisa dalam sekejap berubah menjadi mendung dan hujan. Pemaparan keadaan iklim seperti ini akan bermanfaat untuk dapat menjelaskan permulaan kegiatan pelayaran dalam dunia maritim Nusantara.

Makassar atau kepulauan Nusantara pada umumnya beriklim tropis sehingga negeri ini hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kering (kemarau). Musim penghujan terjadi berkat pengaruh angin musim barat laut (musim basah) yang mulai bertiup pada bulan September. Musim penghujan berakhir ketika pengaruh angin musim itu terhenti dan kemudian diikuti oleh pengaruh angin musim tenggara yang kering pada bulan Juni. Pada waktu angin musim timur laut (juga angin musim basah) yang berlangsung antara bulan Mei hingga September daerah ini tidak mengalami musim penghujan melainkan tetap kemarau, karena terlindung dari deretan pegunungan Lompobatang yang terbentang dari bagian selatan hingga ke bagian utara jazirah Selatan Pulau Sulawesi (Mattulada, 1976: 8-9; Poelinggomang, 1991: 19). Namun demikian, wilayah ini sepanjang tahun sebenarnya tidak pernah kering dalam arti yang sesungguhnya. Setiap waktu mendapat hujan meskipun tidak selalu dalam jumlah yang banyak.

Oleh karena itu hanya daerah yang berada pada bagian timur pegunungan itu yang mengalami musim penghujan (Poelinggomang, 1991: 19). Lagi pula intensitasnya tidak selalu sama, banyak tergantung pada keadaan setempat.

Dalam bulan Januari curah hujan mencapai angka yang paling tinggi, sedangkan angka minimal dicatat pada bulan Agustus. Perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau lebih banyak dirasakan di bagian timur kawasan Makassar. Selang waktu di antara kedua musim ini adalah masa pancaroba (bulan April dan Oktober) pada waktu mana arah angin belum menentu, dan dapat datang dari manapun juga.

Dua musim yang silih berganti tersebut disebabkan oleh lokasinya antara dua kontinen, masing-masing di sebelah utara dan selatan katulistiwa. Musim dingin di benua Asia bagian utara adalah musim panas bagi benua Australia, dan sebaliknya, musim dingin di Australia bertepatan waktu dengan musim panas di bagian utara Asia. Perubahan musim ini menyebabkan pula perubahan gerak angin yang berpindah dari kontinen yang sedang mengalami musim dingin ke arah benua yang panas (Lapian, 1987: 65). Tentu saja perubahan ini lebih dirasakan di daerah yang berdekatan dengan salah satu kontinen. Dalam hal ini, pengaruh angin musim di Sulawesi tidak sekuat dan kontinu jika dibandingkan dengan, misalnya, daerah yang lebih dekat dengan tanah daratan Asia. Dalam hal ini letak ekuatorial juga agak memperkecil pengaruh dari variasi angin musim tersebut (Lapian, 1987: 66).

Perubahan angin musim tidak hanya berpengaruh pada kegiatan pertanian masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan pelayaran niaga. Itulah sebabnya ketika angin musim barat berhembus pada bulan September, maka rute pelayaran niaga penduduk kawasan itu juga berubah. Angin musim barat laut biasanya dimanfaatkan oleh pedagang yang berada di kawasan barat Nusantara, misalnya dari Malaka, Riau, Johor dan Batavia untuk berlayar ke arah timur, ke Makassar dan kepulauan rempah di Maluku (Poelinggomang, 1991: *op.cit.*). Para pedagang yang ingin meneruskan pelayaran mereka ke Pulau Rempah dapat memilih dua jalur alternatif yang terpendek dan tercepat. Pertama, menelusuri jazirah selatan Pulau Sulawesi dan untuk menghindari ancaman gelombang besar di perairan Makassar para pelayar mengarahkan kapal-kapal mereka menuju Buton. Di sini mereka istirahat beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan ke Maluku. Penggunaan jalur ini terutama ketika menghadapi angin musim barat laut yang melintasi wilayah Sulawesi.

Jalur pelayaran kedua, dan mungkin menjadi pilihan yang sangat riskan, karena harus melewati laut Banda yang sangat dalam, adalah

menelusuri Selat Makassar ke arah timur menuju Pulau Ternate atau ke arah utara atau ke pulau-pulau sekitarnya hingga mencapai Pulau Seram dan daerah kepala burung- Irian Jaya. Pelayaran pada jalur ini menggunakan pengaruh angin musim tenggara yang berhembus pada bulan Juni hingga Agustus atau juga pengaruh angin darat dari daratan Sulawesi dan angin laut yang berlangsung antara Juli hingga September. Setelah itu baru memanfaatkan pengaruh angin musim barat laut dalam pelayaran memasuki Maluku (Poelinggomang, 1991: *ibid.*).

Selanjutnya pelayaran balik ke Makassar para pedagang menunggu angin musim timur laut yang bertiup antara bulan Mei hingga September. Dalam pelayaran ini umumnya kapal dan perahu membutuhkan pelabuhan singgah karena pengaruh angin musim ini melemah di perairan Laut Flores dan Laut Jawa pada bulan Juni akibat pengaruh angin musim tenggara. Dalam hubungan ini Makassar merupakan pelabuhan singgah maupun niaga dari pedagang yang datang dari arah timur. Bila ingin meneruskan pelayaran ke arah barat harus menunggu hingga melemahnya pengaruh angin musim tenggara dan menguatnya pengaruh angin musim timur laut pada bulan Agustus. Hal ini juga disebabkan oleh arus laut yang biasanya mengikuti arah angin (Poelinggomang, 1991: 23) sehingga sulit melintasi dengan hanya menggunakan tenaga pendayung untuk menggerakkan perahu.

Dalam periode yang sama, di lingkungan kepulauan Nusantara berlaku musim hujan atau musim barat sehingga tidak banyak pedagang-pedagang dari arah timur Nusantara berlayar ke Malaka atau pusat-pusat perdagangan lainnya di wilayah barat. Pelayaran dari Maluku memakai musim timur atau musim kemarau, yaitu dari bulan Mei sampai September. Para pedagang terpaksa menunggu musim barat berakhir, dan ini berarti mereka kembali pada bulan Januari.

Pelayaran balik melalui Selat Makassar tidak hanya memanfaatkan pengaruh angin musim timur laut tetapi juga pengaruh perubahan angin darat dan angin laut dalam pelayaran ke selatan. Di samping itu pelayaran ke selatan dapat juga dilakukan pada waktu pengaruh angin musim barat laut karena terjadinya perubahan angin musim pada perairan Laut Sulawesi. Pada bulan Desember angin barat laut yang bertiup di bagian utara Sulawesi sudah semakin lemah dan pada bulan Januari mulai bertiup angin musim utara yang berlangsung hingga bulan April (Poelinggomang, 1991: *ibid.*). Khusus di Laut Sulawesi selama musim barat ketika angin bertiup kencang, para pelaut dan nelayan di wilayah itu menghentikan kegiatan mereka untuk melaut; tetapi bahkan pada musim lain pun mereka lebih suka berlayar menyusur pantai untuk berlindung di balik gunung menghindari angin

tenggara, yang dikenal sebagai angin selatan oleh penduduk setempat (Lapian, 1984: 29). Para ahli meteorologi cenderung menghubungkan kekuatan angin barat ini dengan pembentukan angin topan di daerah yang terletak lebih ke utara. Walaupun gejala kekuatan angin topan tidak sampai masuk kawasan Sulawesi tetapi kekuatan "ekornya" masih cukup keras, terlebih bilamana posisi topan itu agak ke selatan dari yang biasa terjadi. Hal ini terutama dialami dalam bulan Desember (Lapian, 1987: 67-68).

Para pelaut Portugis yang mulai nampak di cakrawala Nusantara pada permulaan abad ke-16, mencoba merintis jalur pelayaran baru untuk menghindari angin barat. Bangsa Portugis mulai mengalihkan perhatian melalui jalur pelayaran lewat Kalimantan Utara dan Timur, dari Ternate ke Malaka; yang pertama oleh Garcia Henriques pada bulan Mei 1522, diikuti pada tahun berikutnya oleh Antonio de Abreu. Menurut perkiraan pada waktu itu, rute ini akan memperpendek jarak Malaka dan Maluku (Lapian, 1984: 32; 1987: 131) di mana Sulawesi masuk dalam rute itu. Namun usaha ini gagal, dan kapal-kapal itupun kembali ke Maluku (Lapian, 1984: *ibid.*).

Tetapi di tahun 1526 Dom Jorge de Menezes berhasil menyelesaikan pelayaran itu, walau dari arah yang berlainan. Ia dikirim dari Malaka ke Ternate pada tahun itu untuk menggantikan Garcia Henriques sebagai kapten di Maluku. Dalam pelayarannya ke Ternate, ia melintasi perairan Kalimantan Utara. Setelah mencapai Pulo Gaya di sebelah utara Kalimantan, ia berlayar ke Cagayan Sulu, kemudian berlayar terus ke Mindanao dan Basilan hingga akhirnya menyusuri pantai Barat Halmahera (Lapian, 1984: *ibid.*; 1987: 131). Penemuan jalur baru ini selain dimaksudkan untuk memperpendek jarak dan mempersingkat waktu singgah di pelabuhan-pelabuhan transit, juga membuka kemungkinan untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan pesisir. Kita tidak mengetahui secara pasti apakah dalam perjalanan ke Maluku melintasi perairan Makassar, tetapi sangat mungkin, bahwa mereka melewatinya dan membuang sauh di sana untuk mengambil perbekalan. Lagi pula di Makassar ketika itu, terutama di Siang, telah bermukim orang-orang Portugis yang telah ikut memainkan peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi pada waktu itu.

Faktor iklim seperti telah dijelaskan, memberikan kemungkinan pengembangan jalur pelayaran Barat-Timur pulang balik secara teratur dan berpola tetap. Faktor ini juga turut menentukan munculnya kota-kota pelabuhan serta pusat-pusat kerajaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan maupun di Sulawesi. Arah angin yang sangat menentukan jalur navigasi

yang ditempuh tergantung pada siklus musim panas dan dingin di daratan Asia, khususnya bagi Nusantara kepulauan (Kartodirdjo, 1992: 5-6).

Koneksitas dalam pelayaran yang membangun relasi Barat-Timur atau sebaliknya, telah memunculkan Makassar sebagai pelabuhan transito utama yang mensuplai kebutuhan logistik para pelaut. Dengan hembusan angin yang tenang dan terlindung dari ombak besar dan angin ribut, menyebabkan pelayaran di selat ini dipandang aman dari hantaman gelombang laut. Selain itu perubahan angin musim, pengaruh angin darat dan angin laut cukup kuat, baik dari daratan Sulawesi maupun dari daratan Kalimantan. Angin darat dari daratan Sulawesi terjadi pada waktu musim tenggara (Juli-September) dan angin laut berlangsung pada waktu musim barat laut (Oktober-April). Sementara angin darat dari daratan Kalimantan berlangsung pada waktu musim barat laut dan angin laut pada waktu musim tenggara. Keadaan ini yang memungkinkan terjadinya hubungan niaga antara Makassar dan pelabuhan lain di pesisir barat Sulawesi (Pare-Pare, Suppa, Majene, dan Kaili) dan pusat-pusat perdagangan yang terletak di pesisir timur Kalimantan (Banjarmasin, Kutai, Samarinda, dan Bulungari) (Poelinggomang, 1991: 20).

Pengaruh angin musim utara dan musim tenggara juga telah memungkinkan terciptanya jalur pelayaran utara-selatan yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan keramik di Cina, Asia Tenggara dan Nusantara bagian timur. Menurut Mikami (1990) bahwa pada abad ke 9-10 telah terbentuk tiga jalur pelayaran keramik yang menghubungkan Cina dengan Asia Barat, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ketiga jalur tersebut adalah; 1). Jalur pelayaran kapal bermuatan barang yang berawal dari pelabuhan Guanzhou di Guandong menuju ke berbagai pelabuhan di Asia; 2). Jalur pelayaran dari pelabuhan Mingzhou atau Yangzhou, ke arah selatan menuju Kepulauan Filipina, menelusuri sepanjang pantai Kalimantan serta Sulawesi, dan akhirnya ke bagian timur Pulau Jawa; 3). Jalur pelayaran ke arah selatan pantai Vietnam, dan pada ujung selatan pantai Vietnam menyeberang ke Teluk Siam menuju bagian tengah semenanjung Malaka. Di sini jalur terpecah menjadi dua bagian, yaitu; a). kapal yang berlayar menyeberang Semenanjung Malaka melalui tanah genting-Kra, dan kemudian keluar di Samudera Hindia, dan b). kapal yang berlayar terus ke Selatan menyusuri pantai Semenanjung Malaka hingga bagian paling ujung selatannya, kemudian berbalik arah dan terus menuju ke utara melalui selat Malaka hingga keluar di Samudera Hindia. Kapal-kapal yang berlayar melalui jalur 3a dapat bertemu di pelabuhan Mantai-Srilangka dan berlanjut terus ke arah barat yaitu ke Quilon di India Selatan, Bambhor di Pakistan,

Masqat di Oman dan Siraf di Iran. Untuk jalur 3b kapal berlayar melewati ujung selatan Semenanjung Malaka kemudian berbelok ke arah tenggara sampai di Jambi, Palembang, dan juga pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa (Mikami, 1990: 119-125; Widiati, 1996: 1-2).

Dengan interpretasinya ini, Mikami mencoba memetakan posisi masing-masing pelabuhan yang disinggahi dengan deskripsi yang terkadang jauh lebih dalam dari ahli lainnya. Kenneth R. Hall, seorang pakar sejarah maritim menyusun model jaringan perdagangan (*commercial zones*) yang agak berbeda dengan Mikami. Meskipun model *commercial zones* ini digulirkan lebih awal dari teori *ceramic road*, yang telah mengilhami Mikami untuk membuat model yang sama-- walaupun dengan mengambil angsang-ancang periode yang berbeda--akan tetapi keduanya menunjukkan adanya koneksitas sebuah jaringan yang telah terbangun sejak awal.

Menurut Hall, bahwa pada abad ke 14 dan permulaan abad ke-15 terdapat lima jaringan perdagangan yang sangat luas yang membentang di kawasan Asia. Pertama, adalah jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Koromandel di India Selatan, Siam, Birma, dan pesisir utara dan barat Sumatra. Kedua, adalah jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga, adalah jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand dan Vietnam Selatan, yang biasa disebut dengan jaringan perdagangan Laut Cina Selatan. Keempat, adalah jaringan perdagangan Laut Sulu, meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao dan pesisir utara Kalimantan. Kelima, adalah jaringan perdagangan Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Kepulauan Sulawesi, pesisir barat Kalimantan, Jawa dan bagian Selatan Sumatra. Jaringan perdagangan ini berada di bawah hegemoni kerajaan Majapahit di Jawa Timur (Hall, 1985: 20-25).

Jalur perdagangan seperti dikonsepsikan kedua pakar ini nampaknya membawa harapan untuk menemukan rute pelayaran keramik ke Makassar abad ke 16-17, sehingga nanti akan diketahui kedudukan Makassar dalam jaringan. Berdasarkan temuan pada beberapa situs arkeologi di Sulawesi Selatan dan hubungannya dengan situs-situs lain di Nusantara pada masa yang sama, kita dapat menyusun peta persebaran keramik dengan memulainya dari jalur pelayaran niaga. Pelayaran bermula dari pusat-pusat perdagangan (*trade centres*) Cina, antara lain; Jiangxi (baca, *Kiangsi*) dengan *kiln sites*-nya di Jingdezhen (*Ching-te Chen*), Jizhou (*Chi-chou*), Fuzhou-Dehua (*Te-hua*), Amoy dan Swatow di Propinsi Fujian (*Fukien*), Guangzhou-Shiwan di Guangdong (*Kuangtung*) memasuki Hanoi-Batrang kemudian bergerak menuju Thanh-hoa dan Martaban Birma. Atau langsung

dari Amoy melintasi pantai Wu-hsu lalu menuju baratdaya menyusur pantai Cina ke delta Sungai Mutiara. Lalu memasuki pusat perdagangan Ayuthia (Thailand), menelusuri pantai Vietnam bagian Selatan sebelum memasuki pusat perdagangan Malaka. Saat paling berbahaya terentang di sepanjang rute itu, pertama-tama di sepanjang pantai Vietnam terdapat banyak batu karang dan sering terjadi perompakan, maka banyak di antara mereka merintis jalur baru dengan melintasi tanah genting Kra, dari Takua Pa di pantai sebelah barat menuju Ch'aiya di pantai sebelah timur dekat teluk Bandon atau dari Kedah di pantai sebelah barat Singora (Sjafei, 1982: 53). Rute perjalanan ini lazim disebut "jalur sutra" yang menghubungkan Cina dengan berbagai belahan dunia lain; Asia Tengah, Turkestan sampai ke Laut Tengah. Jalur ini berhubungan juga dengan jalan-jalan kafilah (*caravan trade*) dari India dan Asia Tengah (Sjafei, 1982: 50). Di Semenanjung Malaka, terutama di Kedah dan Pasai, para pedagang tinggal beberapa saat untuk memasarkan produk-produk mereka, sambil menunggu angin barat yang mengantarkannya ke arah barat. Di ujung barat Sumatra, terutama di Samudera Pasai, perjalanan diteruskan ke arah selatan, ke Jambi dan Palembang. Melalui perairan Laut Jawa mereka memasuki Banten, Batavia, Tuban dan Demak. Menurut Ong Tai-hai yang pernah berlayar ke Batavia, jarak rata-rata pelayaran tersebut memakan waktu sekitar 280 *keng*, di mana 1 *keng* ditetapkan dengan 40 *li* atau 13 mil laut atau 28 hari (Blussé, 1988: 171). Ketika angin musim barat laut bertiup para pedagang menjelajahi Kepulauan Nusantara di belahan timur untuk memasuki daerah produksi utama dalam perdagangan ketika itu, yakni Maluku. Sebelum memasuki Pulau Rempah para saudagar ini lebih dahulu berkelana di wilayah Makassar untuk memasarkan barang produksi mereka. Rute pelayaran bagian pertama ini kita namakan dengan jalur barat.

Jalur pelayaran kedua atau kita namakan jalur timur, dapat dimulai dengan menarik garis awal dari pusat-pusat perdagangan terpenting Cina abad ke 16-17. Dimulai dari kiln terbesar di Cina bagian pesisir dalam, yaitu Jingdezhen yang banyak menghasilkan barang-barang halus dari masa Ming hingga Qing. Perjalanan dari Jingdezhen-Jiangxi menuju pelabuhan Amoy atau Swatow kemungkinan menggunakan jalan darat. Di sini para pedagang bertemu dengan saudagar-saudagar dari Fujian, Zhejiang, dan Guandong. Dari pelabuhan Amoy, Swatow atau Guandong, atau melalui Formosa (sekarang Taiwan) kemudian berlayar menuju Luzon, Mindoro, Mindanao dan Sulu. Di Kepulauan Pilipina mereka berhadapan dengan ancaman gangguan bajak laut yang beroperasi di sekitar perairan Laut Sulawesi, terutama di Sulu dan Mindanao. Sambil menunggu bertiupnya

angin timur pada bulan April sampai September yang menyeberangkan mereka ke Kota Kinibalu, Sabah, Brunei, Miri, Singkawang dan Banjarmasin, para pedagang tinggal beberapa saat lamanya. Oleh karena itu, waktu singgah yang dipersingkat akan dapat membantu mereka menekan pajak pelabuhan dan mengurangi beban biaya kepabeanan. Selain mereka menghindari serangan bajak laut dari selatan yang mulai beroperasi kembali pada bulan Maret dan Oktober. Sebenarnya pelayaran ke arah utara bisa diadakan sepanjang tahun, tetapi jika keberangkatan agak terlambat, maka perjalanan akan menjadi sulit karena berhadapan dengan arah angin yang berlawanan (Lapian, 1987: 268). Dari Kalimantan kapal-kapal pedagang diarahkan menuju Makassar yang kemudian diteruskan ke Kepulauan Maluku.

Penelusuran jalur timur ini didukung oleh sejumlah fakta pada setiap tempat yang dilalui. Di Filipina temuan-temuan berasosiasi terungkap melalui ekskavasi secara sistimatis oleh Roxas Aurora Lim. Dalam penelitiannya di situs-situs; Sta. Ana-Manila, Calatagan-Batangas, Pila-Laguna, dan Jolo-Sulu ia menemukan keramik dalam jumlah yang memadai berupa mangkuk, piring, buli-buli, yang berasal dari Cina, Thailand dan Annam yang diproduksi sekitar abad ke 15-17, yang identik dengan temuan dari Takalar dan Pangkep Sulawesi Selatan (Roxas Aurora Lim, 1987: 14,18, 21, 75-76; Tjandrasasmita, 1970: 9-10, 19-20, 22-26).

Ketergantungan pada sistem angin ini membuat waktu berlayar dan berlabuh di Makassar berbeda-beda. Oleh karena itu timbullah kebutuhan untuk menyimpan barang dagangan selama periode antara kedatangan penjual dan pembeli. Dalam hal ini Makassar dapat menjalankan fungsinya sebagai emporium. Di sini bertemu jalur perdagangan dari Barat, Utara, dan Timur baik perdagangan lokal, regional maupun internasional. Makassar kemudian berkembang sebagai pasar yang menawarkan berbagai produksi hasil bumi, tidak hanya rempah-rempah budak, beras, damar, dan emas tetapi juga hasil produksi perlbagai bangsa, di antaranya adalah tekstil dari India, keramik dari Cina, Thailand dan Annam.

Dengan berkembangnya Makassar sebagai sebuah emporium maka pelayaran niaga antara timur dan barat tidak lagi ditempuh secara langsung. Para pedagang dari Cina atau Teluk Parsi, umpamanya, cukup sampai di Malaka atau di Makassar saja, di mana perdagangan bisa dilakukan dengan pedagang-pedagang lainnya yang berdatangan dari berbagai kawasan. Para pedagang dari Malaka pun tidak perlu meneruskan pelayaran sampai ke Maluku atau ke tempat manapun. Demikian pula pedagang dari Cina hanya cukup muncul di Makassar untuk memperoleh

komoditi dagang dari Maluku. Maka dapatlah dipahami betapa pentingnya Makassar sebagai pelabuhan transito bagi Nusantara dengan dunia timur maupun dengan Cina dan Asia Tenggara. Inilah yang dinamakan *emporium trade* yang, menurut Chaudhuri, merupakan salah satu sarana pokok bagi munculnya kapitalisme di kalangan penduduk yang berdiam di sekitar Lautan Hindia itu (Chaudhuri, 1989).

Daftar Pustaka

- Braudel, Fernand
1971 *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phillip II, Jilid I.* Diterjemahkan oleh Sian Reynolds, New York, San Fransisco, London: Harper Colophon Books, Harper and Row.
- Cense, A.A. dan H.J. Heeren
1972 *Pelajaran dan Pengaruh Kebudajaan Makassar-Bugis di Pantai Utara Australia.* Diterjemahkan dengan pengawasan Dewan Redaksi LIPI-KITLV dengan Kata Pengantar A.B. Lopian dari *Makkassaars-Boeginese Prauwvaart op Noord-Ausralië* (BKI, jilid 108: 248-265).
- Hall, D.G.E.
1988 *Sejarah Asia Tenggara.* Surabaya: Usaha Nasional. Diterjemahkan oleh I.P. Soewarsha dengan suntingan M. Habib Mustopo dari *A History of Southeast Asia* (Thrid edition, London-Melbourne Toronto: St. Martin's Press, 1968).
- Lopian, A.B.
1984 "Perebutan Samudera: Laut Sulawesi pada Abad XVI dan XVII", *Prisma*, No. 11 : 28-43.
- Leirissa, R.Z., G.A. Ohorella dan Yudi B. Tangkilisan.
1996 *Sejarah Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mattulada
1984 *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah.* Jakarta: Bhakti Baru.
- Reid, Anthony
1990 *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Tanah di Bawah Angin, Jilid I.* Jakarta; Yayasan Obor - Indonesia. Diterjemahkan oleh Mochtar

Pabotinggi dari *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume One: The Lands Below in the Winds* (New Haven and London: Yale University Press, 1988).

Sandy, I Made
1987

Iklim Regional Indonesia. Depok: Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Van Leur, J.C. dan F.R.J. Verhoeven
1974

Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia. Jakarta: Bhratara. Diterjemahkan oleh Kartini Abubakar dengan kata pengantar A.B. Lopian, dari artikel "Mahan op den Indischen Lessenaar" (Mahan di Meja Baca Hindia) *Kolonial Tijdschrift* No. XXX Th. 1914: 576-586, dan "In de ban van Mahan" *Koloniaal Tijdschrift* XXX Th. 1941: 783-787.

Poelligomang, Edward L.
1991

Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19. Disertasi Amsterdam-Centrale Huisdrukkerij Vrije Universiteit.

Jejak Komunitas Bugis-Makassar: Sebuah Tinjauan Sejarah dan Arkeologi

Andi Nuralang

(Peneliti pada Balai Arkeologi Banjarmasin)

Pendahuluan

Bugis dan Makassar merupakan nama suku di Indonesia. Kedua suku tersebut mendiami Sulawesi Selatan. Suku Bugis mendiami sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan bagian utara sedangkan Suku Makassar memiliki wilayah lebih kecil dibandingkan dengan wilayah Suku Bugis terletak di bagian selatannya. Kedua suku tersebut mempunyai kiprah dan andil dalam perjalanan realita sejarah Indonesia.

Sejak abad ke-16, orang Bugis cenderung ke luar dari daerah asalnya, merantau ke seluruh Nusantara, hingga ke Australia dan Muangthai. Pelras (1996), indonesianis asal Prancis berpendapat bahwa suku bangsa Bugis bersifat modern sejak sekitar abad ke-17, dan minat untuk migrasi merupakan salah satu aspek dari sifat modern itu (Robinson 2000). Bukti sejarah yang mendukung pernyataan Pelras yaitu pada akhir abad ke-16 terjadi serentetan peristiwa yaitu kekalahan Sultan Hasanuddin yang berakibat menandatangani perjanjian Bungaya (18 November 1667) menimbulkan migrasi secara besar-besaran (Mahmud, 1999). Sementara itu ketika Benteng Tosora dihancurkan oleh Arung Palakka misalnya, banyak orang melakukan migrasi. Di bawah hegemoni Arung Palakka 1770-1736, Wajo dilanda kelaparan hebat. Perdagangan orang-orang Wajo praktis terhenti. Perdagangan dengan dunia luar dilarang. Banyak sekali orang-orang yang menderita, merantau ke Makassar, Donggala, Bima, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Singapura, Johor, Patani dan Kamboja (Abidin, 1983) dan ke Bali (Fadillah, 1999) ke Brunei (Sodrie, 1994). Bukti sejarah tersebut didukung oleh temuan arkeologis berupa nisan tipe Bugis Makassar sebagai bukti derasnya arus migrasi ke daerah-daerah yang disebutkan di atas.

Pelayaran Bugis Makassar dalam waktu itu sudah meliputi hampir seluruh perairan Nusantara. Cerita tentang pengembaran Sawerigading bisa memberi petunjuk tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi. Tetapi gambaran yang lebih jelas baru diperoleh dari catatan pada sesudahnya. Umpamanya dalam tulisan tentang *Hukum Laut Amanna Gappa*, dan juga dari peta laut Bugis. Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa pelayaran mereka

meninggalkan bekasnya pula pada budaya penduduk pantai utara Australia. Misalnya, pemasangan tiang layar dalam upacara pemakaman orang mati yang walaupun sebenarnya merupakan penemuan baru Suku Aborigin sendiri diadopsi dari kebiasaan orang-orang Bugis-Makassar memasang tiang layar pada waktu mereka hendak berlayar pulang (Tjandrasasmita, 1993).

Deddy Mulyana dengan mengutip C.C. Macknight dalam bukunya *The Voyage to Marege* (1976) tentang pengembaraan orang-orang Indonesia (Bugis Makassar) di Australia antara lain disebutkan bahwa hampir selama seabad, dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, setiap tahunnya rata-rata seribu orang Makassar yang berlayar ke pesisir utara Australia dalam rombongan-rombongan yang lebih terorganisir. Orang-orang Makassar biasa menangkap teripang (*Holothuroidea*) di sepanjang daerah yang disebut Marege (Mulyana, 2000).

Menurut Berndt dan Berndt (1954), orang-orang Makassar tidak hanya membawa barang-barang dari Makassar, tetapi juga memproduksi barang tembikar, kain, dan layar. Mereka juga memperkenalkan barang tembikar, tulis menulis, kertas, buku, pohon, dan buah asam serta mengajari orang-orang Aborigin bermain kartu, membuat senjata tajam dari besi, membuat sampan dan layar yang memungkinkan orang-orang Aborigin berlayar lebih aman di laut dan di sungai, serta bekerja secara sistematik untuk mendapatkan upah".

Hal menarik berkenaan dengan Indonesia. Pada undangan pameran sejarah Afrika Selatan di Jakarta, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Afrika Selatan tahun lalu di antara kalimatnya tertulis "tahukah anda bahwa bangsa Indonesia yang pertama kali membawa Islam di Afrika Selatan". Bangsa Indonesia yang dimaksud adalah Syekh Yusuf Makassar, putra Sulawesi Selatan. Beliau bukan milik masyarakat Bugis saja, tapi milik masyarakat Indonesia, Afrika Selatan dan Ceylon (Srilangka) bahkan Syekh Yusuf meletakkan dasar Islam di Afrika Selatan. Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela tahun 1994 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Yusuf. Sedangkan di Indonesia gelar pejuang kemerdekaan dianugerahkan Presiden Soeharto tanggal 9 November 1995 (Tablod *Serambi Ummah*, 2001). Hal senada juga dikemukakan oleh Azyumardi Azra bahwa Syekh Yusuf Almakassari asal Sulawesi Selatan berhasil menghimpun orang-orang buangan Melayu Indonesia dalam satu komunitas muslim Afrika Selatan (Azra 1999).

Menurut Colvin dalam bukunya *The Romance of South Africa*, Syekh Yusuf bersama murid-muridnya berhasil mempengaruhi orang-orang buangan lainnya sehingga bisa membuat satu kesatuan komunitas masyarakat Islam. Komunitas ini masih ada hingga sekarang, mereka inilah yang dikenal sebagai orang-orang *Slammanyer* (Tabloid *Serambi Ummah* op.cit). Bukti arkeologi yang

mendukung hal itu seperti dikemukakan oleh Ahmad Chalid Shodrie (1994), bahwa di pekuburan Uduk-Uduk, dan data di batu Tarsilah yang semuanya berada di Brunei Darussalam. Inskripsi tersebut menunjukkan keberadaan Suku Bugis dan Makassar di negara tersebut. Suku tersebut turut memperkaya budaya setempat seperti halnya juga disebutkan Hamid Abdullah (1980) bahwa keberadaan orang Bugis dan Makassar di Sumatra tepatnya disemenanjung merupakan faktor pendukung kekuatan militer dan politik. Dalam sistem kekuasaan di Malaka mereka merupakan pelaksana polisi kerajaan, baik yang menyangkut masalah ekonomi atau perdagangan maupun yang menyangkut operasi militer dan pertahanan negara. Secara teori kekuasaan tertinggi ada di tangan Sultan Johor namun kelompok orang-orang Bugis pada kedudukan yang sangat kuat, secara operasional kekuasaan berada di tangan kelompok militer Bugis.

Data lain tentang peranan Migran Bugis Makassar terdapat dalam naskah *Tuhfah Al Nafis*, Hikayat Haji Sirat (Bali). Orang Makassar diperkirakan bermigrasi ke daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Gowa pada permulaan abad ke XVI yaitu Bima (1617), Sumba, Dompu, Sangar, Kutai dan Berau (1618), Sumbawa (1619), Buton, Muna, Bungku, Solor, Teduk, Manggarai (1626), Banggai dan Sulu (1634), Limboto, Gorontalo, Tondano dan Sangir (1634), Timur (1640), Buru, Toba dan Bebe (1640) (Spillet 1998). Indikasi kehadiran orang Makassar tampak dari bentuk nisan di Bima yang memperlihatkan adanya pengaruh bentuk nisan dan jirat seperti yang terdapat pada makam Tallo dan Tamalate di Makassar bahkan di Selaparang terdapat nisan tipe Bugis Makassar (Ambary 1980). Sementara daerah tujuan migrasi ke barat mencakup Batavia, Banten, Gresik, Mataram, Samarinda dan Malaka (Mahmud 1999). Peranan orang-orang Makassar di Riau, Lingga, Johor, Selangor, Aceh, Mempawa, dan Sukadana. Migran Bugis di Kalimantan bermukim di Pontianak, dan Mempawadi Pantai barat, dan Pulau laut, Pagatan, Bulungan, Gunung Tabur, dan Kutai (Pelras 1996), dengan bukti arkeologis dari pulau Laut sampai Kutai ditemukan sebaran nisan tipe Bugis Makassar (Atmojo, 2000) dan inskripsi lontara pada makam dan naskah kuna (Nuralang, 2000); Keberadaan orang Bugis Makassar di Kalimantan yaitu pagatan dan kusan dengan temuan arkeologis berupa bekas istana, keramik, naskah lontara, stempel kerajaan dan lain-lain (Kusmartono dan Nuralang 2001); Di Samarindah, mendirikan Republik Demokratis atas izin Sultan Kutai. Di Pasir membangun perkampungan dengan nama Mangkasar (Makassar), sampai sekarang (Mahmud *Op. cit*). Temuan tipe nisan Bugis Makassar dan inskripsi lontara memperkuat dugaan bahwa orang-orang Bugis berpengaruh sampai di pusat kerajaan Pasir (Atmojo, *Op.cit*).

Migrasi Sebagai Suatu Inovasi dan Perubahan Budaya

Adaptasi lingkungan merupakan suatu fenomena menarik yang mendapat perhatian para ahli sosial. Dengan adaptasi lingkungan manusia dapat hidup dimana saja bumi dipijak, dan wilayah-wilayah yang dijadikan daerah migran siap menerima perubahan yang terjadi, baik yang dibawa oleh suatu migran lokal maupun asing. Di Indonesia, hal tersebut telah mengglobal dengan adanya peniruan unsur-unsur baru dari suatu kebudayaan tertentu. Tentunya peniruan tersebut mengadopsi hal-hal yang positif.

Adaptasi lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis dan Makassar di beberapa tempat di Nusantara dan negara lain telah nampak dari tinggalkan material yang ditinggalkan di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Seperti dikatakan di atas, rtinggalkan tersebut menyisakan sejumlah interpretasi bahwa eksistensi Bugis Makassar memperkuat dugaan bahwa suku tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada.

Untuk survive setiap makhluk harus memiliki tempat tinggal, ini berarti bahwa setiap migran harus memiliki permukiman pada suatu wilayah tertentu. Mereka akan menyesuaikan diri dengan iklim dan suasana lingkungan dan akhirnya menemukan kesesuaian hidup didalam masyarakat baru tersebut (Mattulada 1994). Fakta demikian dapat dilihat di daerah Kalimantan dimana daerah tersebut dikelilingi oleh sungai dan laut. Gerak adaptasi bugis Makassar salah satu diantaranya adalah adanya pembuatan perahu layar, salah satu contoh di Kalimantan selatan yaitu di wilayah batu Licin yang terkenal dengan produksi perahu Bugisnya. Rangkaian dari adptasi tersebut adah sosialisasi dan pembauran. Pembauran atau asimilasi adalah sebuah proses integrasi atau proses penyatuan. Hal ini membawa penerima kelompok migran kedalam kalangan penduduk asli menjadi satu kesatuan (Mattulada Op.cit).

Pada dasarnya, kebudayaan adalah proses adaptasi karenanya ada yang berpendapat bahwa konsep tentang kebudayaan ialah sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan mereka keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan fisik, bukan hanya dapat dipakai untuk mengembangkan diri manusia dengan masyarakat. Apabila ini terjadi akan tercapai suatu keselarasan hubungan antara alam dan manusia. Kondisi kebudayaan suatu bangsa dan tingkat pembangunan yang diupayakan berada pada hubungan yang saling mempengaruhi. Karena itu, keanekaragaman satu bangsa dan golongan sosial di Indonesia telah memunculkan pula terjadinya berbagai pola strategi adaptasi (Poewanto 1999).

Penulis ingin menggarisbawahi bahwa perubahan yang terjadi akibat adanya migrasi tidak dipandang sebagai suatu disintegrasi melainkan

merupakan suatu inovasi dan perubahan budaya. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah aqualibriun yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mancapai derajat yang minimal.

Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu. Dapat kita lihat bahwa migrasi bukan sesuatu yang dipandang mempunyai akibat sepihak yaitu menambah masalah bagi daerah atau wilayah yang dijadikan daerah migrasi. Di Kalimantan Timur dan Selatan misalnya ditemukan pemukiman-pemukiman Bugis Makassar dan bahkan mendirikan kerajaan di bawah pengaruh orang-orang Bugis (Kusmartono dan Nuralang 2001), pelayaran-pelayaran Bugis Makassar ke Australia membawa perubahan budaya bagi masyarakat Aborigin (Sugiantoro 1987), pemukiman muslim di Afrika Selatan yang dibangun oleh Syekh Yusuf Ai Maqassari, bahkan mendapat perhatian serius dari pemerintahan setempat, sekarang masyarakatnya terkenal dengan komunitas masyarakat *Slammayer* (Tabloit *Serambi Ummah*, 2001), di Samarindah atas izin Sultan Kutai mendirikan "Republik Demokratis" (Mahmud 1999), di Sumatera, atas izin Sultan Johor, orang Bugis memegang tampuk pertahanan militer (Abdullah, 1980), di Bali atas izin Raja Bali orang-orang Bugis membangun permukiman Islam di tengah-tengah budaya Bali yang beragama Hindu (Fadillah, 1999).

Perubahan-perubahan di atas didalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*axtra systemic change*); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional;

serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat (Susanto, 1977).

Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri (Ibid.)

Perubahan yang ingin penulis sampaikan bahwa perubahan budaya yang dilakukan oleh orang-orang Bugis merupakan sifat kemodernan Bugis seperti dilansir dari pemaparan Pelras, seorang pemerhati Bugis dikatakan bahwa:

- a) Perkembangan pemikiran yang sangat bersifat rasional, dikaitkan dengan inovasi teknologi dan kemajuan pengetahuan, terutama dalam budaya maritim, misalnya dalam pembuatan perahu, navigasi dan astronomi; Contoh perkembangan pemikiran ini dapat kita lihat diposisir timur Kalimantan antara lain dengan cara pembuatan perahu yang sudah terorganisir, pelayaran Bugis Makassar sampai di Australia dan Afrika selatan, bahkan sampai ke pelayaran Sawerigading ke seluruh Nusantara dan dunia luar. Hal tersebut merupakan bukti kemajuan navigasi dan pengetahuan astronomi yang mereka miliki.
- b) Pergeseran dari produksi untuk keperluan pribadi ke produksi untuk pasar;
- c) Menekankan hak dan kewajiban individu;
- d) Pergerakan dari masyarakat berdasarkan kekerabatan ke masyarakat berdasarkan hubungan antar individu dan kelompok (dalam politik kerajaan, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi, misalnya hubungan antar atasan dan bawahan hubungan Ponggawa Sawi yang digambarkan oleh Mattulada 1975 sebagai sistem manajemen Bugis);
- e) Memeluk sistem pemikiran yang meluas (*world wide system of thought*) misalnya agama Islam ; dan seperti dilakukan oleh Syekh Yusuf sampai ke Afrika Selatan dan negara-negara lainnya.
- f) Hubungan yang makin lama makin mendalam dengan dunia di luar pulau kecilnya, Sulawesi, melalui perdagangan, agama dan lain-lain (Robinson 2000). Hubungan perdagangan dan ekonomi yang akhirnya beralih menjadi kepentingan politik di Kalimantan Selatan bagian timur seperti dirangkum dalam reset dan dokumen berupa Berita Penelitian Arkeologi (Kusmartono dan Nuralang 2001).

Sebuah hipotesis untuk menghadapi persoalan itu telah dikembangkan Pelras dalam kasus orang Bugis di Sulawesi Selatan, melalui pendekatan sejarah etnik ia telah memberi kita fakta-fakta bahwa nilai-nilai modernitas orang Bugis dan etnik lainnya di Sulawesi Selatan telah muncul sepanjang abad jauh sebelum era kolonial, yang sejak awal telah berkembang secara otonom dengan menunjukkan cara-cara untuk inovasi dan adaptasi (Fadillah Op.cit).

Menurut Mochtar Naim (1979) dalam Robinsin (2000), merantau merupakan sejenis migrasi dengan konotasi budaya yang tidak gampang diterjemahkan, misalnya dalam bahasa Inggris. Menurut Naim, merantau mencakup enam unsur;

- 1) Meninggalkan kampung halaman;
- 2) Dengan kemauan sendiri;
- 3) Untuk jangka pendek dan panjang;
- 4) Dengan tujuan mencari nafkah, pengalaman dan pengetahuan;
- 5) Biasanya dengan niat pulang ke kampung halaman;
- 6) Berdasarkan unsur-unsur budaya.

Pada masa lalu perantau Bugis mengambil peranan penting dalam kekuasaan di beberapa lokasi di Nusantara ini (seperti yang digambarkan dalam Naskah Melayu *Tuhfat al Nafis*). Menurut Pelras dalam Robinsin bahwa walau ...orang Bugis selalu dipresentasikan sebagai pelaut yang berani dan kejam, yang pada masa lalu terlibat dalam perdagangan budak belian dan bajak laut...suatu pemahaman yang lebih mendalam pada sejarahnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil di antara mereka yang melibatkan diri dalam kegiatan maritim, dan hampir tidak ada yang menjadi bajak laut, sementara perdagangan, produksi tanaman keras, dan pertanian merupakan inti kegiatan ekonominya (Robinson 2000). Latar belakang timbulnya migrasi Bugis Makassar secara besar-besaran menurut Andi Zainal Abidin Farid (1983), menyatakan bahwa terjadinya peperangan-peperangan antarkerajaan, peperangan melawan bangsa-bangsa asing, penjajah, revolusi dan kemiskinan.

Migrasi itu sendiri mempunyai dampak, kalau berbicara dampak berarti ada sisi positif dan negatif. Tidak semua migrasi yang dilakukan oleh migran Bugis Makassar tidak mengalami ketegangan dan kerusuhan. Fenomena tersebut timbul karena daerah yang didatangi tidak lagi bersahabat bagi para pendatang, seperti dikatakan di atas. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan

serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat (Susanto, 1977).

Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri (Ibid.)

Perubahan yang ingin penulis sampaikan bahwa perubahan budaya yang dilakukan oleh orang-orang Bugis merupakan sifat kemodernan Bugis seperti dilansir dari pemaparan Pelras, seorang pemerhati Bugis dikatakan bahwa:

- a) Perkembangan pemikiran yang sangat bersifat rasional, dikaitkan dengan inovasi teknologi dan kemajuan pengetahuan, terutama dalam budaya maritim, misalnya dalam pembuatan perahu, navigasi dan astronomi; Contoh perkembangan pemikiran ini dapat kita lihat diposisir timur Kalimantan antara lain dengan cara pembuatan perahu yang sudah terorganisir, pelayaran Bugis Makassar sampai di Australia dan Afrika selatan, bahkan sampai ke pelayaran Sawerigading ke seluruh Nusantara dan dunia luar. Hal tersebut merupakan bukti kemajuan navigasi dan pengetahuan astronomi yang mereka miliki.
- b) Pergeseran dari produksi untuk keperluan pribadi ke produksi untuk pasar;
- c) Menekankan hak dan kewajiban individu;
- d) Pergerakan dari masyarakat berdasarkan kekerabatan ke masyarakat berdasarkan hubungan antar individu dan kelompok (dalam politik kerajaan, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi, misalnya hubungan antar atasan dan bawahan hubungan Ponggawa Sawi yang digambarkan oleh Mattulada 1975 sebagai sistem manajemen Bugis);
- e) Memeluk sistem pemikiran yang meluas (*world wide system of thought*) misalnya agama Islam ; dan seperti dilakukan oleh Syekh Yusuf sampai ke Afrika Selatan dan negara-negara lainnya.
- f) Hubungan yang makin lama makin mendalam dengan dunia di luar pulau kecilnya, Sulawesi, melalui perdagangan, agama dan lain-lain (Robinson 2000). Hubungan perdagangan dan ekonomi yang akhirnya beralih menjadi kepentingan politik di Kalimantan Selatan bagian timur seperti dirangkum dalam reset dan dokumen berupa Berita Penelitian Arkeologi (Kusmartono dan Nuralang 2001).

teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu. Dapat kita lihat bahwa migrasi bukan sesuatu yang dipandang mempunyai akibat sepihak yaitu menambah masalah bagi daerah atau wilayah yang dijadikan daerah migrasi tetapi mendatangkan manfaat sekurang-kurangnya untuk menambah pengayaan khasanah budaya setempat –daerah migran-. Suatu kasus unik dimana komunitas Islam bugis mampu berekosistensi dengan komunitas Bali juga memiliki identitas budaya sendiri (Fadillah 1999). Suatu fenomena menarik yang harus digarisbawahi bahwa migrasi bukan merupakan suatu perubahan yang harus dihindari melainkan merupakan suatu pemersatu antara pendukung kebudayaan tersebut.

Penutup

Migrasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan suatu integrasi melainkan sebagai persatu antar banyak unsur, manusia, lingkungan dan budayanya. Migrasi Bugis Makassar yang dipaparkan disini adalah salah satu contoh konkrit yang paling tidak sebagai bahan renungan.

Perubahan budaya yang dibawa oleh migran Bugis Makassar telah membawa dampak terhadap daerah dimana migran tersebut terjadi. Daerah – tempat migran- mendapatkan suatu perubahan sekurang-kurangnya perubahan pada pola kebudayaan, pengayaan budaya setempat atau bahkan suatu penambahan pendapat daerah setempat.

Bukti resistensi, adaptasi dan inovasi komunitas Bugis Makassar di Nusantara dan negara-negara lain yaitu komunitas tersebut mampu memainkan peran ganda. Terlibat dalam urusan politik sebagai bentuk partisipasi mereka dalam mempertahankan kedaulatan penguasa lokal dimana mereka tinggal dan mempunyai basis ekonomi dan menonjol dalam sistem perdagangan . namun pada kenyataannya, keberhasilan migrasi Bugis Makassar didorong banyak faktor antara lain adaptasi, prestasi dan perkawinan. Sehingga migrasi tersebut membawa kontak baru bagi masyarakat dan budaya, namun dipandang sebagai faktor fundamental dalam peningkatan perubahan. Adanya komplik-komplik di sejumlah daerah di Indonesia disebabkan karena tidak adanya kontak-kontak budaya dengan daerah lain. Salah satu cara yaitu dengan jalan migrasi. Migrasi tersebut membawa satu komunitas masyarakat yang berbeda budaya menuju hubungan yang erat ■

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid
1980 *Kepemimpinan dan Invasi Militer Bugis di Semenanjung. Analisis Kebudayaan.* Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan
- Abidin, Andi Zainal
1983 *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar.* Bandung : Alumni
- Ambary, Hasan Muarif
1980 *Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan.* Makalah Majalah Arkeologi. Nomor II/5. Jakarta : Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Anonim,
2001 *Tabloid Serambi Ummah/No. 080 tanggal 18-24 Mei 2001 M halaman 11.*
- Atmojo; Bambang Sakti Wiku.
2000 *Penelitian Arsitektur Makam raja-raja di Kabupaten Berauan Bulungan Kalimantan Timur. Laporan Penelitian Arkeologi.* Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin
- Azra, Azyumardi.
1999 *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia.* Bandung : Mizan.
- Fadillah, Mohammad Ali.
1999 *Warisan Budaya Bugis di Pesisir Selatan Denpasar Nuansa Sejarah Islam di Bali.* Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti dan Andi Nuralang

- 2000 *Kehidupan Sosial Ekonomi dan Perdagangan di Daerah Pesisir Tenggara Kalimantan Pada Abad ke-19 Masehi*. Berita Penelitian Arkeologi No. 08. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin
- Lapian, A.B
2001 *Nusantra : Silang Bahari Dalam Hanri Lombert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed) Panggung Sejarah Persembahan kepada Prof. Dr.Denys Lombard Jakarta: Balai Pustaka*
- Mahmud, M. Irfan
1999 *Perspektif Arkeo-Historis Migrasi Bugis dan Makassar: Kuasi Jaringan Nasional Nusantara*. Artikel Walennae Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan tenggara. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.
- Mattulada, H.A
1994 *Lingkungan Hidup Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulyana, Deddy
2000 *Islam dan Orang Indonesia di Australia Catatan Pengembaran Muslim Indonesia*. Jakarta Logos.
- Nuralang, Andi
2001 "Hubungan Kalimantan dan Sulawesi : Kajian Berdasarkan Inskripsi Pada Makam dan Naskah Kuno". *Naditira Widya* Edisi No. 08 tahun 2001. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin
- Pelras, Christian
1995 *The Bugis first Edition*. Cambridge Masschutsetts: Blackwell. |
- Poerwanto, Hari
1999 *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yokyakarta: Pustaka Peljar.

Robinson, Kathryn.

2000 *Inter ethnic Violence, The Bugis, and Problem of Explanation. Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropolgi Indonesia Depok: Jurusan Antropologi Fisip UI*

Sodrie, Ahmad Cholid

Hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam Melalui kajian Inkripsi pada batu Nisan. Berkala Arkeologi. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta

Spillett, Peter.

1998 *The Search For Pre-Colonial History of Timur : Using Methods and Techniques of oral Testimony, Interviewing and Recording.* Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Welennae No 1 Juli 1998. Makassar: Balai Arkeologi Makassar.

Sugiantoro, R.B.

1987 *Sepintas Mengenai Aborigin Australia : Merekalah Pelaut Pertama Dalam Sejarah Manusia.* Artikel dalam Australia di Mata Indonesia : Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973 – 1988. Jakarta: Gramedia.

Susanto, Phil Astrid S.

1977 *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Bandung: Binacipta.

Tjandrasasmita, Uka (ed)

1993 *Sejarah Nasional Indonesia III.* Jakarta: Balai Pustaka.

Penyusunan Rencana Kerja Pemugaran

Ismijono

(Kasi Pemugaran Direktorat Purbakala dan Permuseuman Kementerian Budpar)

A. Pendahuluan

Penyusunan rencana kerja pemugaran merupakan salah satu fungsi pengelolaan kegiatan dalam rangka menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemugaran secara sistematis dan terukur. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rencana kerja pemugaran pada dasarnya disusun dengan mengacu pada langkah-langkah yang ditetapkan melalui studi atau penilaian sebagai suatu upaya untuk memenuhi syarat-syarat arkeologis, historis, dan teknis.

Sehubungan hal di atas, perencanaan pemugaran selain berisi uraian mengenai peninggalan dengan segala permasalahan yang dihadapi, juga berisi penjelasan secara rinci mengenai jenis kegiatan dan sasaran yang akan dikerjakan, serta uraian pelaksanaan yang mencakup ketenagaan, sarana dan prasarana, maupun jadwal dan anggaran biaya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

Ruang lingkup perencanaan pemugaran mencakup peninggalan sejarah dan purbakala tidak bergerak yang ketika ditemukan sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat (*dead monument*) maupun yang masih berfungsi (*living monument*), seperti punden berundak, candi, rumah tradisional, dan bangunan peninggalan masa kolonial.

Mengingat kegiatan pemugaran merupakan pekerjaan yang sifatnya spesifik, dalam hal ini menyangkut penanganan warisan budaya yang memiliki nilai penting dilihat dari sudut sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka setiap upaya penangananan senantiasa harus dilakukan pengawasan dan pelaporan sebagai suatu usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan pemugaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Kegiatan dan Sasaran

Dalam pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala kegiatannya semata-mata tidak hanya ditujukan pada penanganan bangunan dan penataan lahan yang menjadi bagian integral dari bangunan, akan tetapi termasuk pula di dalamnya kegiatan penelitian, pendokumentasian dan pengawasan sebagai suatu upaya agar kegiatan

pemugaran dapat terlaksana sesuai nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung di dalamnya.

1. Penelitian Pemugaran

Penelitian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap melakukan pemugaran. Kegiatan penelitian selain ditujukan untuk mendukung dalam penyusunan rencana kerja pemugaran, juga dimaksudkan sebagai suatu upaya mengamati dan menelaah tinggalkan-tinggalan yang kemungkinan ditemukan pada saat pemugaran sedang dilaksanakan. Sehubungan hal tersebut, cakupan kegiatannya antara lain :

No	Kegiatan	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Penelitian Arkeologis	(....)	kali
2	Penelitian Teknis	(....)	lokasi

Penelitian arkeologis, adalah kegiatan penelaahan keaslian desain arsitektur dan tata letak bangunan yang meliputi kelengkapan unsur atau komponen, dan orientasi bangunan terhadap lingkungannya.

Penelitian teknis, adalah kegiatan penelaahan keaslian desain struktural bangunan yang meliputi *daya dukung* tanah dan sistem *konstruksi*, termasuk didalamnya *jenis* dan *kualitas* bahan yang digunakan.

2. Pendokumentasian

Dalam setiap pelaksanaan pemugaran senantiasa selalu diikuti dengan kegiatan pendokumentasian. Kegiatan tersebut sangat penting selain untuk menunjang kelancaran jalannya pekerjaan, juga merupakan suatu usaha pelestarian data yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Sehubungan hal tersebut cakupan kegiatannya meliputi :

No	Kegiatan	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Pemetaan	(....)	m ²
2	Penggambaran	(....)	m ²
3	Pemotretan	(....)	eksp

Perawatan bahan, adalah kegiatan pembersihan dan pengawetan terhadap unsur bahan yang telah mengalami pelapukan, baik karena proses fisis, kimia, maupun biotis.

Perkuatan struktur, adalah kegiatan perbaikan struktural bangunan seperti perkuatan pada bagian tanah dasar dan sistem konstruksi bangunan sesuai permasalahan yang dihadapi.

Penggantian bahan, adalah kegiatan penggantian unsur atau bahan bangunan yang rusak atau hilang atas dasar pertimbangan teknis dan arkeologis.

(2) Pemulihan Arsitektur

Pemulihan arsitektur merupakan tahapan kegiatan dalam rangka pemasangan unsur bangunan kedalam keaslian bentuk arsitektur dan tata letaknya secara kontekstual. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis pekerjaan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Pemasangan unsur bongkar	(...)	m ³
2	Pemasangan unsur temuan	(...)	bh/m ³
3	Pemasangan unsur pengganti	(...)	bh/m ³

Pemasangan unsur bongkar, adalah kegiatan pemulihan arsitektur berdasarkan atas unsur bangunan yang dibongkar dengan berpedoman pada sistem registrasi (*rebuilding*).

Pemasangan unsur temuan, adalah kegiatan pemulihan arsitektur berdasarkan atas unsur bangunan yang ditemukan dengan cara pencocokan antar unsur terkait (*anastilosis*).

Pemasangan unsur pengganti, adalah kegiatan pemulihan arsitektur berdasarkan atas bahan baru untuk mengganti bagian bangunan yang rusak atau hilang dengan cara studi banding (*analogi*).

4. Penataan Lahan

Penataan lahan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan dalam rangka pelestarian lahan bangunan benda cagar budaya sesuai permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini adalah penataan lahan yang

menjadi bagian integral dari bangunan dengan tujuan selain untuk melindungi dan memelihara kelestarian bangunan, juga diarahkan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatannya bagi kunjungan wisata. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis pekerjaan sebagai berikut.

(1) Penataan Halaman

Untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan bangunan dan lahan yang menjadi bagian integral dari bangunan diperlukan penataan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Pembersihan halaman	(....)	m ²
2	Pematangan tanah	(....)	m ³
3	Perkuatan struktur tanah	(....)	m ³

Pembersihan halaman, adalah kegiatan pembersihan lahan di sekitar bangunan dari segala sarana dan prasarana yang digunakan pada saat pemugaran berlangsung seperti pembongkaran perancah, bengkel kerja, dan unsur lain yang tidak terkait dengan keberadaan bangunan.

Pematangan tanah, adalah kegiatan menata permukaan tanah lahan di sekitar bangunan sesuai peruntukannya seperti penambahan atau pengurangan muka tanah (cut and fill) untuk penempatan bangunan sarana dan fasilitas.

Perkuatan struktur tanah, adalah kegiatan perkuatan lahan di sekitar bangunan yang dianggap rawan atas dasar pertimbangan teknis, seperti pembuatan tanggul atau turap sesuai kebutuhan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

(2) Sarana dan Fasilitas

Untuk menunjang upaya pengembangan dan pemanfaatan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala bagi kunjungan wisata dan pengamanannya diperlukan berbagai sarana dan fasilitas sebagai berikut.

No	Sarana Penunjang	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Ruang Informasi	(....)	m ²
2	Jalan Setapak	(....)	m ¹
3	Sistem Drainase	(....)	m ¹
4	Pagar Pengaman	(....)	m ¹

Ruang informasi, merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan apresiasi masyarakat atas warisan budaya, dalam bentuk bangunan yang dirancang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

Jalan setapak, merupakan salah satu sarana untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam mengapresiasi warisan budaya; dalam bentuk jalan setapak yang dirancang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi lahan bangunan.

Sistem drainase, merupakan salah satu sarana untuk mengalirkan air pada waktu musim hujan, dalam bentuk jaringan saluran yang dirancang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan saluran lama bila masih ditemukan.

Pagar Pengaman, merupakan salah satu sarana untuk perlindungan dan pengamanan lahan bangunan, dalam bentuk pagar hidup atau permanen yang dirancang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan pengamanannya.

(3) Pertamanan

Untuk memberikan kenyamanan dan suasana sejuk bagi kunjungan wisata diperlukan sebuah taman di halaman sekitar bangunan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Sasaran/Target	
		Volume	Satuan
1	Penanaman pohon	(....)	jenis/bh
2	Penataan taman	(....)	m ² /unit
3	Pembuatan papan informasi	(....)	bh/unit

Penanaman pohon, adalah kegiatan penanaman pohon pelindung atau peneduh untuk memberikan suasana sejuk bagi pengunjung dalam mengapresiasi warisan budaya dengan memperhatikan jenis tanaman yang tidak berdampak negatif terhadap kelestarian bangunan.

Penataan taman, adalah kegiatan pembuatan taman untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam mengapresiasi warisan budaya dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan pemeliharannya, termasuk di dalamnya tempat untuk istirahat sesuai kebutuhan.

Pembuatan papan informasi, adalah kegiatan pembuatan rambu-rambu dalam rangka mengatur dan mengarahkan pengunjung dalam mengapresiasi warisan budaya seperti papan nama, papan larangan, dan alur kunjungan.

C. Uraian Pelaksanaan

Dalam pencapaian tujuan pemugaran sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan dan sasaran diperlukan sumber daya untuk menunjang terlaksananya kegiatan dan jadwal untuk pelaksanaan. Sumber daya untuk mendukung terlaksananya kegiatan diantaranya adalah tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta jadwal pelaksanaan yang disusun sesuai urutan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, maupun anggaran biaya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya untuk menunjang terlaksananya kegiatan sesuai kebutuhan. Ketenagaan untuk menunjang pelaksanaan pemugaran selengkapny dapat dirinci sebagai berikut.

(1) Tenaga Ahli

Untuk menunjang tugas-tugas yang berkenaan dengan penelitian, perencanaan dan pengawasan selama proses pemugaran berlangsung, dilakukan oleh seorang atau lebih tenaga ahli. Dalam hal ini tenaga ahli dari disiplin ilmu arkeologi, sejarah, sipil, arsitektur dan biologi, atau tenaga ahli terkait lainnya sesuai kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga ahli bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya dengan mengacu pada kaidah-kaidah penanganan yang berlaku.

(2) Pelaksana (Tekno Arkeologi)

Untuk menunjang tugas-tugas yang berkenaan dengan koordinasi kerja di lapangan, dilakukan oleh seorang pelaksana (TA). Dalam hal ini tenaga trampil di bidang pemugaran yang memiliki pengetahuan teknis dan arkeologis atau sebaliknya. Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana (TA) bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

(3) Penunjang Teknis

Untuk menunjang tugas-tugas yang berkenaan dengan pengumpulan data teknis pemugaran, dilakukan oleh seorang atau lebih tenaga teknis di bidang pengukuran, penggambaran, pemetaan, pemotretan, atau tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, para teknisi bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(4) Pekerja

Untuk menunjang tugas-tugas yang berkenaan dengan pekerjaan fisik di lapangan, diperlukan seorang atau lebih pekerja pemugaran (tukang). Dalam hal ini pekerja yang memiliki ketrampilan untuk melaksanakan pekerjaan seperti pembongkaran dan pemasangan kembali bangunan kepurbakalaan. Dalam menjalankan tugasnya, para pekerja bertanggung jawab terhadap terlaksananya pekerjaan sesuai petunjuk yang diberikan.

(5) Pembantu Pekerja

Untuk menunjang tugas-tugas yang dilakukan oleh para pekerja (tukang), diperlukan seorang atau lebih pembantu pekerja dengan tugas membantu kegiatan yang dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya, para pembantu pekerja bertanggung jawab terhadap terlaksananya pekerjaan yang diberikan.

(6) Keamanan

Untuk menunjang tugas pengamanan di lingkungan kerja pemugaran, diperlukan seorang atau lebih tenaga keamanan dengan tugas menjaga keamanan lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga keamanan bertanggung jawab terhadap terciptanya pengamanan di lingkungan kerja pemugaran.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pencapaian tujuan pemugaran selain dibutuhkan tenaga

kerja juga diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran jalannya pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada dasarnya disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

(1) Sarana Kerja

Sarana untuk menunjang pelaksanaan pemugaran diantaranya adalah alat dan bahan untuk kepentingan pembongkaran, perawatan, perkuatan struktur, dan pemasangan kembali, serta penataan halaman sesuai kebutuhan. Sementara sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendokumentasian, yaitu meliputi alat dan bahan untuk kepentingan penggalian, pemetaan, penggambaran, dan pemotretan.

(2) Bangunan Prasarana

Untuk mendukung para pekerja dalam menjalankan tugasnya di lapangan diperlukan prasarana dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan seperti bengkel kerja (*werkeet*), tempat penampungan bahan, dan perancah kerja, serta prasarana lain sesuai kebutuhan. Bangunan prasarana tersebut dirancang dengan menggunakan bahan yang sifatnya semi permanen agar tidak merusak lahan situs.

3. Jadwal Kerja

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pemugaran yang efisien dan efektif, diperlukan jadwal pelaksanaan kerja yang disusun secara sistematis sesuai urutan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan. Tata cara penyusunan dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah setiap kegiatan yang direncanakan dan dihitung volumenya sebagai dasar untuk menghitung jumlah tenaga dan hari kerja yang dibutuhkan. Kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis ke dalam tahapan pelaksanaan kerja pemugaran sebagai berikut. (Tabel 1 dan 2).

(1) Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan adalah tahapan kegiatan dalam rangka mempersiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kerja pemugaran. Dalam tahapan ini cakupan kegiatannya meliputi pengadaan sarana dan prasarana seperti peralatan dan bahan untuk kepentingan pemugaran maupun untuk pembuatan werkit dan perancah kerja, serta melakukan penelitian dan pendokumentasian

seperti penggalian, pemetaan, penggambaran, pemotretan, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

(2) Pekerjaan Pelaksanaan

Pekerjaan pelaksanaan adalah tahapan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan utama pemugaran. Dalam tahapan ini cakupan kegiatannya meliputi perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur seperti pembongkaran, perkuatan struktur, perawatan, pengadaan bahan baru, dan pemasangan kembali unsur bongkar, unsur temuan, unsur pengganti, serta penataan lahan yang menjadi bagian integral dari bangunan seperti penataan halaman, sarana dan fasilitas, dan pertamanan.

(3) Pekerjaan Penyelesaian

Pekerjaan penyelesaian adalah tahapan kegiatan dalam rangka mengakhiri seluruh pekerjaan pemugaran. Dalam tahapan ini cakupan kegiatannya meliputi penyempurnaan pekerjaan hasil pemugaran seperti penyempurnaan bangunan dan halaman di sekitar bangunan, serta pendokumentasian hasil pemugaran seperti pemotretan, penggambaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

D. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya pemugaran merupakan perhitungan uraian pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan anggaran pemugaran dihitung secara *swakelola* melalui tahapan sebagai berikut.

1. Perhitungan Harga Satuan

Perhitungan harga satuan merupakan tahapan kegiatan dalam rangka menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sehubungan hal tersebut, terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran atau besaran bangunan yang akan dijadikan sasaran dengan menggunakan satuan yang terukur.

(1) Satuan Kegiatan

- Untuk pemugaran bangunan seperti candi dari batu atau bata, sasarannya adalah ukuran atau besaran bangunan dengan menggunakan satuan meter kubik (m³). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pemugaran candi, pada umumnya penanganannya ditujukan pada keseluruhan bangunan yang strukturnya bersifat masif.

- Untuk pemugaran bangunan seperti rumah tradisional atau bangunan kolonial, sasarannya adalah ukuran atau luas denah bangunan dengan menggunakan satuan meter persegi (m²). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam pemugaran rumah tradisional atau bangunan kolonial, pada umumnya penanganannya ditujukan pada sebagian komponen atau unsur bangunan yang strukturnya menggunakan sistem rangka atau bangunan pasangan.
- Untuk penataan lahan yang merupakan bagian integral dari bangunan, sasarannya adalah ukuran atau luas lahan yang dimiliki dengan menggunakan satuan meter persegi (m²). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam penataan lahan pada umumnya penanganannya ditujukan pada sebidang tanah dengan permukaan yang datar atau bergelombang.

Perhitungan volume atau luas bangunan sebagaimana diuraikan diatas merupakan satuan kegiatan yang akan dijadikan sasaran utama dalam pencapaian tujuan pemugaran. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan sasaran utama kedalam kegiatan dan sasaran yang lebih rinci sebagai berikut .

Pekerjaan Persiapan

- pembuatan werkit	:	m ²
- pembuatan perancah	:	m ³
- pemetaan	:	m ²
- penggambaran	:	m ²
- pemotretan	:	exp
- penelitian	:	lokasi

Penanganan Bangunan **M3/ M2**

- pembongkaran	:	m ³
- perawatan bahan	:	m ²
- perkuatan struktur	:	m ³
- pengadaan bahan baru	:	m ³
- pemasangan unsur bongkar	:	m ³
- pemasangan unsur temuan	:	m ³
- pemasangan unsur pengganti	:	m ³

Penataan Lahan

m2

- pembersihan halaman	:	m2
- pematangan tanah	:	m3
- perkuatan struktur tanah	:	m3
- pembuatan ruang informasi	:	m2
- pembuatan jalan setapak	:	m'
- pembuatan sistem drainase	:	m'
- pembuatan pagar situs	:	m'
- pertamanan	:	m2

Pekerjaan penyelesaian

- penyempurnaan pekerjaan	:	lokasi
- pendokumentasian	:	berkas
- pelaporan	:	naskah

(2) Satuan Tenaga Kerja

Untuk menghitung kebutuhan anggaran tenaga kerja pemugaran terlebih dahulu harus ditetapkan jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan. Sesuai tahapan pelaksanaan kerja pemugaran, jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan dapat dirinci sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan

- tenaga ahli	:	Orang
- pelaksana (TA)	:	Orang
- penunjang teknis	:	Orang
- pekerja	:	Orang
- pembantu pekerja	:	Orang
- keamanan	:	Orang

Penanganan Bangunan

- tenaga ahli	:	Orang
- pelaksana (TA)	:	Orang
- penunjang teknis	:	Orang
- pekerja	:	Orang
- pembantu pekerja	:	Orang
- keamanan	:	Orang

Penataan Lahan

- tenaga ahli	:	Orang
- pelaksana (TA)	:	Orang
- penunjang teknis	:	Orang

- pekerja : Orang
- pembantu pekerja : Orang
- keamanan : Orang

Pekerjaan Penyelesaian

- tenaga ahli : Orang
- pelaksana (TA) : Orang
- penunjang teknis : Orang
- pekerja : Orang
- pembantu pekerja : Orang
- keamanan : Orang

(3) Satuan peralatan dan Bahan

Untuk menghitung kebutuhan anggaran peralatan dan bahan pemugaran terlebih dahulu harus ditetapkan jumlah dan jenis yang diperlukan. Untuk peralatan yang bersifat habis pakai dimasukkan dalam kelompok bahan, untuk peralatan yang bersifat jangka panjang dimasukkan dalam kelompok peralatan (barang inventaris). Peralatan dan bahan untuk menunjang pelaksanaan pemugaran dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Peralatan :

- peralatan pemugaran : bh, set, unit
- peralatan konservasi/ laborat : bh, set, unit
- peralatan pemetaan : bh, set, unit
- peralatan penggambaran : bh, set, unit
- peralatan dokumentasi : bh, set, unit
- peralatan penelitian : bh, set, unit

Bahan

- bahan ATK : bh, rim, roll, m
- bahan pemugaran : bh, m, m', m², m³
- bahan konservasi/ laborat : bh, ltr, m, m²
- bahan pemetaan : bh, roll, m
- bahan penggambaran : bh, roll, m
- bahan dokumentasi : exp, doos
- bahan penelitian : bh, m, m²

2. Perhitungan Kebutuhan Anggaran

Perhitungan kebutuhan anggaran merupakan tahapan kegiatan dalam rangka menyusun anggaran ke dalam suatu format atau

lembaran kerja perhitungan uraian pengeluaran. Dalam format atau lembaran kerja ini berisi perhitungan uraian pengeluaran mengenai :

(1) Gaji Upah

Gaji upah merupakan uraian pengeluaran untuk biaya tenaga kerja pemugaran. Dalam format ini berisi uraian mengenai jumlah dan jenis tenaga, hari kerja, standar gaji, dan total biaya tenaga kerja. Sistem pembayaran gaji upah terdiri atas *gaji upah bulanan* dengan menggunakan satuan OB (orang/bulan), dan *gaji upah harian* dengan menggunakan satuan OH (orang/hari). Gaji upah bulanan biasanya ditujukan untuk pembayaran tenaga ahli, pelaksana (TA), penunjang teknis, dan tenaga keamanan. Sementara gaji upah harian pada umumnya ditujukan untuk pembayaran pekerja dan pembantu pekerja. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hari kerja dalam satu tahun anggaran diperhitungkan 1 tahun : 300 hari, 1 bulan : 25 hari.

(2) Peralatan

Peralatan merupakan uraian pengeluaran untuk biaya pengadaan peralatan pemugaran. Dalam format ini berisi uraian mengenai jumlah dan jenis peralatan, standar harga umum (SHU) peralatan, dan total biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan.

(3) Bahan

Bahan merupakan uraian pengeluaran untuk biaya pengadaan bahan pemugaran. Dalam format ini berisi uraian mengenai jumlah dan jenis bahan, standar harga umum (SHU) bahan, dan total biaya pengadaan bahan yang dibutuhkan.

(4) Lain-Lain

Lain-lain merupakan uraian pengeluaran untuk biaya pengelolaan kegiatan pemugaran. Dalam format ini berisi uraian mengenai biaya untuk pembuatan laporan, penggandaan, cetak foto, transport lokal, dan jenis pengeluaran lain yang terkait.

(5) Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan uraian pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam format ini berisi uraian mengenai biaya untuk perjalanan dinas ke luar kota atau dalam kota. Perjalanan dinas untuk luar kota, diberikan biaya transportasi dengan menggunakan satuan OK (Orang/Kali), dan lumpsum dengan menggunakan satuan OH (Orang/Hari). Untuk

perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan biaya transport lokal dengan menggunakan satuan OK (Orang/Kali).

E. Pengawasan

Pengawasan pemugaran merupakan salah satu fungsi pengelolaan kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung didalamnya. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang penanganan bangunan kepurbakalaan, dan dilakukan secara periodik atau berkala melalui pemantauan dan penilaian kegiatan.

Untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan pemugaran yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pemugaran dari segi administrasi atau manajemen dapat diketahui dengan cara melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan dari aspek pencapaian target pekerjaan. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan sasaran pemugaran telah dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah direncanakan.
2. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pemugaran dari segi teknis atau akademis, dapat diketahui dengan cara melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan dari aspek pencapaian tujuan dilakukannya pekerjaan pemugaran. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan sasaran pemugaran telah dilaksanakan sesuai konsep penanganan berwawasan pelestarian atau kaidah-kaidah penanganan yang berlaku.

Seluruh hasil pengawasan kemudian disimpulkan dan dirumuskan kedalam laporan tertulis sebagai bahan masukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan pemugaran secara berhasil guna dan tepat sasaran.

F. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemugaran terdapat beberapa hal yang perlu dipahami sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana kerja pemugaran merupakan salah satu fungsi pengelolaan kegiatan dalam rangka menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemugaran secara sistematis dan terukur.

2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rencana kerja pemugaran pada dasarnya disusun dengan mengacu pada langkah-langkah yang ditetapkan melalui studi atau penilaian sebagai suatu upaya untuk memenuhi syarat-syarat arkeologis, historis, dan teknis.
3. Perencanaan pemugaran selain berisi uraian mengenai peninggalan dengan segala permasalahan yang dihadapi, juga berisi penjelasan secara rinci mengenai jenis kegiatan dan sasaran yang akan dikerjakan, serta uraian pelaksanaan yang mencakup ketenagaan, sarana dan prasarana, maupun jadwal dan anggaran biaya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
4. Ruang lingkup perencanaan pemugaran mencakup peninggalan sejarah dan purbakala tidak bergerak yang ketika ditemukan sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat (dead monument) maupun yang masih berfungsi (living monument), seperti punden berundak, candi, rumah tradisional, dan bangunan peninggalan masa kolonial.

Daftar Pustaka

- Depdikbud, 1980, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0222e/0/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Depdikbud, 1982, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0209/U/1982 tentang Sistem dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin dan Pembangunan.
- Depdikbud, 1987, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0415/U/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Depdikbud, 1997, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
- Depdikbud, 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 5 tahun 1992.
- Depdikbud, 1997, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.*
- Eko Budihardjo, 1997, *Arsitektur sebagai Warisan Budaya*, Jakarta: Djambatan.
- I G. N. Anom, 1997, *Keaslian Sebagai Prinsip dalam Pemugaran*, Makalah pada Diskusi Ilmiah Arkeologi XV di Jambi.
- Ismijono, 1997, *Teknik Pemugaran BCB dan Situs*, Makalah pada Seminar Pemugaran dan Konservasi Benda Cagar Budaya, di Jakarta.
- Mundardjito, dkk, 1986, *Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan*, Jakarta: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Parmono Atmadi, 1979, *Beberapa Patokan Rancangan Bangunan Candi*, Desertasi, Proyek Pemugaran Candi Borobudur.

Soekmono, 1997, *Azas, Tujuan dan Wawasan Arkeologis dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya*, Makalah pada Seminar Pemugaran dan Konservasi Benda Cagar Budaya, di Jakarta.

Uka Tjandrasasmita, 1997, *Pelestarian Benda Cagar Budaya melalui upaya Pemugaran*, Makalah pada Seminar Pemugaran dan Konservasi Benda Cagar Budaya, di Jakarta.

Nedeco, 1972, *Description of work for the restoration of Borobudur*, Proyek Pemugaran Candi Borobudur.

Venice Charter, 1964, *International Charter for the Conservation and Restoration of Monument and Site*.

Burra Charter, 1981, *International Charter for the Conservation and Restoration of Monument and Site*.

Florence Charter, 1981, *Charter on the Preservation of Historic Garden*.

Washington Charter, 1987, *Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas*.

Charter of Lausanne, 1989, *Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage*.

